

LAPORAN AKHIR

**TELAAHAN STAF AHLI MENTERI
TENTANG "KESIAPAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN MEA-
UTAMANYA MEKANISME JEJARING DAN PENDAMPINGAN
INDUSTRI RUMAHAN – STUDY KASUS DI PROPINSI SUMATERA
UTARA DAN JAWA TIMUR"**

Oleh:

Dr. Ir. Ma'mun Sarma, M.S., M.Ec
Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc
Deddy Cahyadi Sutarman, STP, MM

KERJASAMA:



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

&



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) IPB**

TAHUN 2016

**RINGKASAN EKSEKUTIF
TELAHAN STAF AHLI MENTERI
TENTANG "KESIAPAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN MEA-UTAMANYA MEKANISME
JEJARING DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI RUMAHAN
STUDY KASUS DI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA TIMUR"**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industry besar (UB), tetapi juga sektor UMKM karena kesamaan karakteristik produk. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang, Tahap RPJPN ke Tiga mengemban 8 misi dimana salah satunya yaitu misi ke 2 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 245 juta jiwa dan 49.1% adalah perempuan, dan 30% adalah anak-anak mempunyai peluang besar dalam MEA dengan populasi sekitar 600 juta. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat membentuk Komunitas ASEAN 2015 dengan 3 pilarnya yaitu: ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community. Untuk hal tersebut telah disusun Cetak Biru untuk masing-masing Pilar. Dalam konteks tersebut, Komunitas Ekonomi ASEAN, merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yaitu didasarkan pada kepentingan bersama negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas dengan prinsip-prinsip: *ekonomi terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum* agar pemenuhan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki 5 elemen aliran bebas yaitu: *aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal dan aliran bebas tenaga kerja terampil.*

Hasil survey pada tahun 2014 oleh Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan data bahwa total kegiatan UMKM di Indonesia mayoritas (60 persen) dikuasai oleh kaum pengusaha perempuan. Sehingga wanita pengusaha mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Industri rumahan merupakan salah satu kontributor UMKM. Dalam konteks ini penting analisis tentang mekanisme jejaring dan pendampingan terhadap UMKM dan Industri rumahan melalui study kasus di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Timur yang diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan strategis di bidang industri rumahan.

Tujuan

Tujuan telaahan ini adalah : 1) Menganalisis kesiapan provinsi dalam pelaksanaan MEA utamanya mekanisme jejaring dan pendampingan industri rumahan, 2) Merumuskan rekomendasi upaya strategis, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesiapan provinsi dalam Pelaksanaan MEA

RuangLingkup

Kajian Kesiapan provinsi dalam Pelaksanaan MEA adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan provinsi baik dari sisi Kebijakan pemerintah daerah maupun kesiapan masyarakat utamanya terkait mekanisme jejaring dan pendampingan bagi UMKM dan industri rumahan setempat dalam dalam Pelaksanaan MEA. Kesiapan dapat dilihat dari analisis dengan membandingkan kajian literature dengan kondisi yang ada di sasaran kajian. Adakah dukungan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan; mekanisme jejaring yang ada, bagaimana pemahaman masyarakat setempat tentang MEA; adakah program prioritas daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah; serta bagaimana kesiapan para pelaku UMKM dan industri rumahan.

Hasil Yang Diharapkan

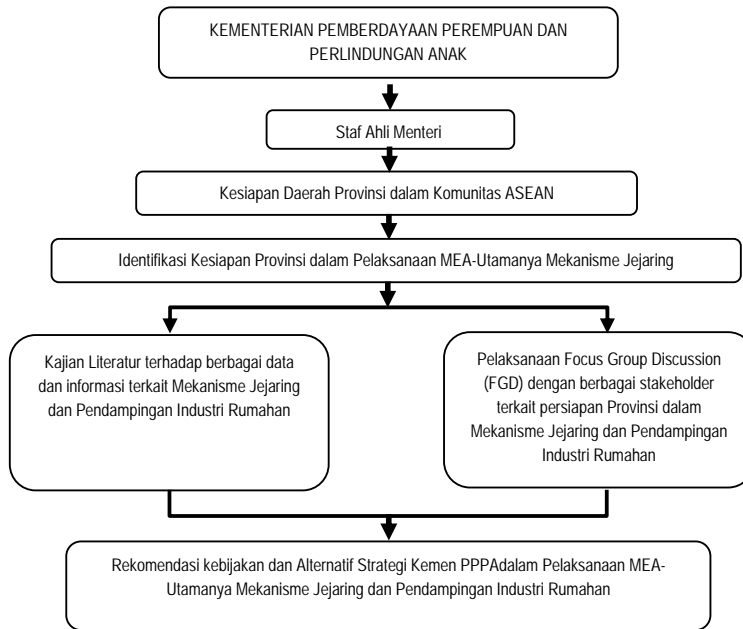
Hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut : 1) Laporan hasil analisis kesiapan provinsi dalam Pelaksanaan MEA di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi JawaTimur, 2) Rumusan Rekomendasi upaya strategis, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesiapan provinsi dalam MEA.

Waktu

Kajian dilakukan dalam kurun waktu bulan Mei s/d Oktober 2016

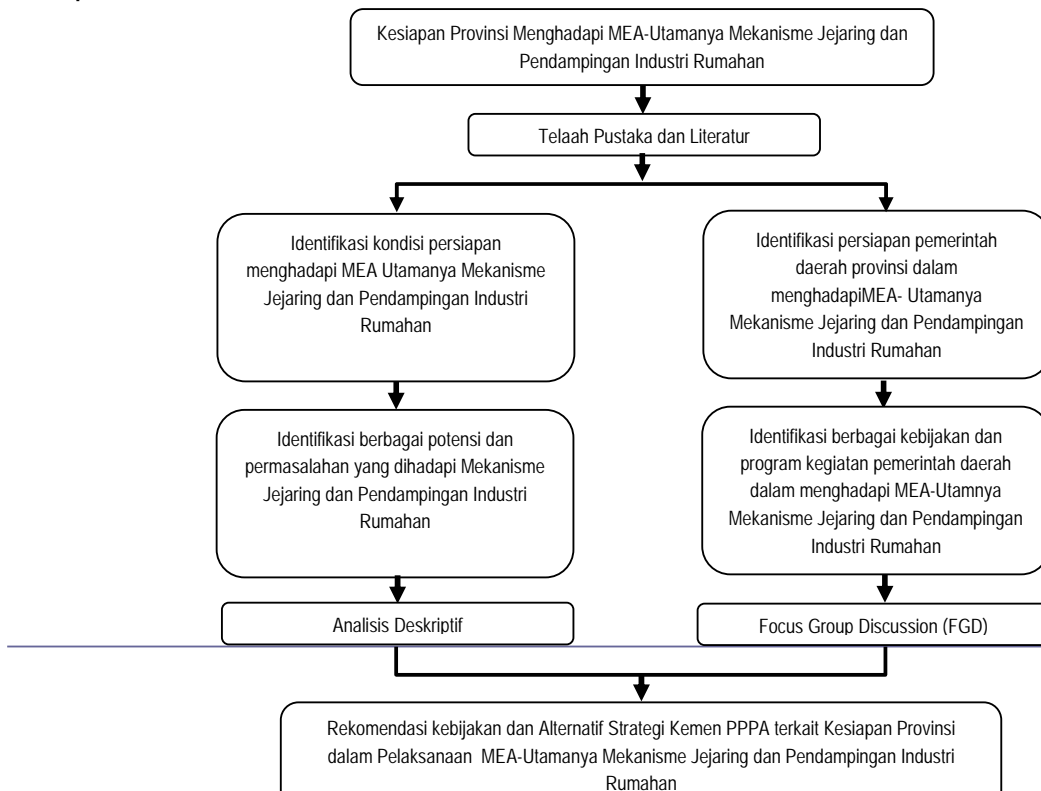
METODE TELAAHAN

Kerangka Pemikiran Konseptual



Gambar. Kerangka Pemikiran Konseptual Kesiapan Daerah Provinsi dalam Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan

Tahapan Telaahan



Gambar. Diagram Alur Tahapan Telaahan Kesiapan Daerah Provinsi dalam Dalam Pelaksanaan MEA-
Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan

Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan meliputi: Karakteristik usaha UMKM khususnya industri rumahan, termasuk UMKM yang dikelola oleh perempuan dan laki-laki; Identifikasi potensi dan permasalahan serta persiapan UMKM khususnya industri rumahan dalam menyongsong komunitas ekonomi ASEAN; Kondisi koordinasi antara UMKM khususnya industri rumahan dengan SKPD dan harapan yang diinginkan dalam mempersiapkan UMKM khususnya industri rumahan untuk menyongsong komunitas ekonomi ASEAN baik dari pendapat UMKM maupun pihak SKPD; Prioritas kebutuhan UMKM khususnya jejaring dan industri rumahanserta Respon SKPD dalam memenuhi kebutuhan UMKM; Rekomendasi berbagai alternatif kebijakan dan program bagi pemerintah provinsi untuk mempersiapkan UMKM khususnya industri rumahandalam menyongsong komunitas ekonomi ASEAN; Menyusun rekomendasi sinergisme Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kementerian/lembaga lainnya dalam mendorong peran UMKM khususnya industri rumahandalam dalam Pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN.

Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data menggunakan: Studi Literatur terhadap berbagai data dan informasi terkait kegiatan UMKM khususnya industri rumahan dan pemerintah daerah provinsi dalam dalam Pelaksanaan MEA; *Focus group discussion* (FGD) yang meliputi beberapa SKPD di wilayah sampel terpilih yang menangani UMKM khususnya industri rumahan. Dalam FGD ini juga diundang beberapa UMKM khususnya industri rumahan terpilih; *Indepth Interview* dari perwakilan SKPD dan industri rumahan.

HASIL TELAAHAN

Sekilas ASEAN Community

Semula Komunitas ASEAN dicanangkan akan dilakukan di 2020, namun melihat situasi internasional dan regional, serta optimisme dan antusiasme negara anggota ASEAN, maka pada KTT 12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, diputuskan bahwa pembentukan Komunitas ASEAN dipercepat menjadi 2015, melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Pilar Komunitas Ekonomi, dan Pilar Komunitas Sosial Budaya. Ketiga pilar Komunitas ASEAN ini terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama.

Kondisi ASEAN Community (MEA)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat. Menurut laporan ekonomi utama tahunan ADB, *Asian Development Outlook (ADO 2013)* yang berisi prediksi tren ekonomi di kawasan ini, memproyeksikan bahwa Indonesia akan tumbuh sebesar 6,4% di 2013 dan melaju ke level 6,6% di 2014, yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Selain dari sektor konsumsi, pertumbuhan perekonomian Indonesia juga dari investasi yang mengalami peningkatan menjadi 9,8% pada 2012, yang didorong oleh membaiknya iklim investasi, rekor pertumbuhan ekonomi yang kuat beberapa tahun terakhir, dan peningkatan kredit. Sebagai hasilnya, rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi 33,2% dalam periode setidaknya 20 tahun terakhir.

UKM dalam hal ini memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan.

UKM dapat menyerap sebesar 97% tenaga kerja Indonesia, terutama dalam mikro ekonomi yang mencapai hampir 95% tenaga kerja. Dari pemaparan di atas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak disebutkan bahwa UKM memiliki kontribusi dalam PDB yang mencapai 4.303 triliun/tahun. Selain itu, untuk membangun perekonomian suatu negara, dibutuhkan SDM yang memiliki jiwa-jiwa *entrepreneur* untuk mengembangkan kewirausahaan suatu negara. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph A. Schumpeter, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Di Indonesia sendiri usaha mikro jumlahnya mencapai 98,82% dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,09%. Hal tersebut menandakan masih banyaknya usaha-usaha yang tergolong mikro dan tidak mengalami perkembangan berarti karena tidak adanya kenaikan level dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya.

Permasalahan utama dari UKM tersebut adalah kesiapan UKM Indonesia dalam menghadapi persaingan pada perdagangan bebas. Saat ini, UKM belum mendapat perhatian banyak untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, belum adanya sosialisasi yang memadai mengenai AFTA 2015, SDM yang banyak namun kurang berkualitas serta memiliki jiwa *entrepreneur* yang tinggi, kurangnya inovasi dalam menghasilkan produk, terbatasnya modal usaha, tidak adanya tujuan jelas yang akan diraih oleh para pelaku UKM, serta kurangnya keahlian maupun pengetahuan untuk mengembangkan usaha. Sifat konsumtif masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan kurang berkembangnya para pelaku UKM karena kalah bersaing dengan produk asing.

Industri Rumahan

Dalam konteks usaha mikro, kecil dan menengah, industri rumahan termasuk kelompok usaha mikro dimana banyak Negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar industri rumahan belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, industri rumahan biasanya dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. Industri rumahan bisa juga berwujud kelompok usaha bersama yang terorganisir secara informal dan lentur dimana masing-masing anggotanya bekerja di rumah masing-masing, sehingga disepadankan dengan istilah industri rumah tangga.

Tujuan pembangunan industri rumahan adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga serta mengembangkan industri kreatif yang menjadikan kekuatan perempuan dalam industri rumahan serta mendorong penguatan jaringan industri rumahan. Sasaran pembangunan industri rumahan adalah usaha mikro yang dikelola oleh dan/atau menjadi tempat kerja kaum perempuan. Klasifikasi industri rumahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan tingkat keberlanjutan usaha, besarnya modal, teknologi proses produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja, lama usaha, pola produk dan sistem penjualan produknya.

KESIAPAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PELAKSANAAN MEA-UTAMANYA MEKANISME JEJARING DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI RUMAHAN

PEMETAAN KONDISI KESIAPAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Kesiapan Indonesia dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara dalam dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih terkendala pada lemahnya baebagai badang, antara lain, kesiapan Sumberdaya Manusia (khususnya UMKM), sarana dan prasarana produksi, modal usaha, infrastruktur wilayah, serta daya saing produk UMKM. Pemberlakuan kebijakan MEA itu dapat menjadi berkah ataupun sebaliknya malah mampu sebagai ancaman. Ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat khususnya UMKM dalam menghadapinya. Namun, hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah-masalah mendasar, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta stabilitas keamanan.

Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya mempersiapkan berbagai langkah baik dalam bidang kebijakan daerah, sarana dan prasarana pengembangan usaha UMKM serta kegiatan dalam peningkatan kualitas baik kualitas produk UMKM maupun Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), baik SDM dari pihak pemerintah maupun SDM pengelola UMKM.

Terkait dukungan kebijakan/komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara : 66,67 % responden menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempunyai dukungan dalam bentuk kebijakan/komitmen dari pimpinan tertinggi dalam bentuk Perda/Surat Keputusan/Pedoman/Edaran 55,56 % responden menyatakan bahwa melakukan usaha-usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan persiapan MEA pada UMKM.

Berbagai instansi/dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya telah memiliki komitmen serta memahami berbagai peluang dan ancaman dengan dilaksanakannya MEA. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pengusulan program dan kegiatan dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka sosialisasi serta upaya peningkatan kualitas SDM serta kualitas produk UMKM. Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka persiapan dan sosialisasi MEA adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan advokasi baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini terkait kebijakan pengusulan APBD yang melibatkan berbagai program dan kegiatan dalam persiapan MEA. Kegiatan advokasi lainnya dilaksanakan melalui pendekatan dengan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh daerah dengan harapan persiapan MEA tersebut didukung dan dipahami serta menjadi suatu kegiatan bersama yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Selain itu Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara pada umumnya telah berupaya membuat dan mempersiapkan jejaring baik dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi serta berbagai perusahaan untuk memperkuat kualitas SDM, Produk UMKM maupun sektor pemasaran produk UMKM dalam rangka persiapan MEA.

Program/Kegiatan Pelaksanaan MEA

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara pada umumnya telah mempunyai berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi MEA kepada seluruh stakeholder. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan berbagai sektor yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi MEA untuk selanjutnya diadopsi pada Rencana Belanja (RENJA) Daerah. Terkait Program/Kegiatan Pelaksanaan MEA di Provinsi Sumatera Utara : 66,67 % responden menyatakan bahwa tidak ada program/kegiatan yang secara jelas mensosialisasikan pelaksanaan MEA 55,56 % responden menyatakan mengalami kesulitan dalam mencari informasi dalam pelaksanaan MEA 55,56 % responden menyatakan bahwa asosiasi sudah membuat jejaring PUG (Pengarus Utama Gender).

Berbagai instansi di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara pada umumnya masih memiliki kesulitan dalam mensosialisasikan persiapan MEA khususnya lingkup UMKM di wilayah dinas masing-masing. Namun demikian kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan antara lain oleh BAPPEDA dengan mengundang berbagai stakeholder terkait MEA dengan mengundang berbagai narasumber terutama terkait program dan kegiatan yang akan dipersiapkan dan dilaksanakan, dengan narasumber dari unsure kebijakan adalah DPRD dan BAPPEDA serta nara sumber dari unsur teknis dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA

Terkait dukungan SDM dalam persiapan MEA di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara terutama pada unsur pimpinan eselon 3 di berbagai dinas pada umumnya telah memahami kondisi MEA baik kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ditimbulkan MEA. Hal serupa juga dinilai sama pada sebagian besar pegawai di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada umumnya telah mengetahui keberadaan MEA. Namun pemahaman tersebut dirasakan belum merata, mengingat pada dinas/instansi yang banyak bersinggungan dengan MEA dinilai lebih memahami bila dibandingkan dengan pegawai pada dinas/instansi yang kurang bersinggungan langsung dengan MEA.

Terkait Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara : 55,56 % responden menyatakan bahwa pimpinan asosiasi tidak memahami MEA dan 66,67 % responden menyatakan sebagian besar pegawai di asosiasi tidak memahami MEA. Pada masing-masing dinas di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada umumnya mempunyai penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan terkait MEA. Namun secara umum pimpinan asosiasi dan pegawai sampai saat ini belum sepenuhnya memahami MEA. Motor penggerak sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan MEA dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG), sedangkan pemberian layanan konsultasi/pendampingan tentang persiapan

MEA pada UMKM khusus untuk perempuan dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB).

Ketersediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Ketersediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sangat diperlukan dalam memperlancar dan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan sosialisasi dan persiapan MEA di Provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini tidak semua instansi/dinas memiliki jejaring KIE dalam rangka sosialisasi MEA. Terkait Ketersediaan Media komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Provinsi Sumatera Utara : 77,78 % responden menyatakan bahwa tidak ada KIE dari PEMDA dan 66,67 % responden menyatakan tidak ada media komunikasi dengan PEMDA.

Hanya Dinas/instansi terkait langsung dengan UMKM yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang membawahi bidang UMKM yang memiliki jejaring KIE. Jejaring tersebut difasilitasi melalui media komunikasi seperti internet serta media cetak yang jangkauannya masih terbatas pada internal dinas.

Kualitas Produk dan Dukungan Harga

Dukungan kualitas produk dan harga produk UMKM bagi kegiatan persiapan MEA di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada umumnya belum memenuhi standar kualitas produk internasional. Hal tersebut terjadi mengingat tidak semua produk yang dihasilkan oleh UMKM mampu bersaing dengan produk luar negeri karena dalam proses produksinya secara umum belum memiliki SOP yang baku. Terkait Kualitas Produk dan Dukungan Harga produk UMKM di Provinsi Sumatera Utara : 55,56 % responden menyatakan bahwa kualitas produk UMKM anggota asosiasi belum baik sedangkan 66,67 % responden menyatakan bahwa harga belum dapat dijangkau. Selain itu juga UMKM memerlukan pendampingan dari dinas terkait maupun semua pihak sehingga UMKM memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik yang akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk dan strategi harga yang tepat dalam memenangkan persaingan dengan produk luar negeri.

Jejaring dalam Pemasaran

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Terkait Jejaring dalam pemasaran produk UMKM di Provinsi Sumatera Utara : 100 % responden menyatakan bahwa jejaring pemasaran berada di wilayah dalam negeri dan 33,33 % responden menyatakan memiliki jejaring pemasaran di luar negeri. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Jejaring Kemitraan Industri Rumahan

Kemampuan UMKM di Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar MEA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT). Terkait Jejaring Kemitraan UMKM di Provinsi Sumatera Utara : 100 % responden menyatakan bahwa memiliki jejaring kemitraan di dalam negeri, dan 33,33 % responden menyatakan bahwa memiliki jejaring kemitraan di luar negeri. Pengembangan

kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah

Kemampuan UMKM di Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Terkait Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara : Sejumlah 77,78 % responden menyatakan memiliki jejaring kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar MEA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT). Untuk itu sangat diperlukan dukungan kerjasama antara UMKM/Asosiasi dengan pemerintah agar tercipta sinergitas yang baik dalam pengembangan usaha dan perluasan pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global

Perkembangan UMKM di Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat.

Terkait Kesiapan mental UMKM Anggota Asosiasi di Provinsi Sumatera Utara untuk berkompetisi global : 55,56 % responden merasa takut; 66,67 % responden menyatakan tertantang; 77,78 merasa tidak senang dan 88,89 % merasa tidak siap segalanya. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Pendampingan UMKM Perempuan

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sampai saat ini telah melakukan upaya pendampingan terhadap UMKM perempuan yang dimotori oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB). Upaya pendampingan tersebut antara lain dengan melakukan pembentukan kluster fhasion yang sebagian besar dilakukan/diusahakan oleh pengusaha perempuan. Terkait Pendampingan UMKM Perempuan di Provinsi Sumatera Utara : 55,56 % responden menyatakan tidak ada pendampingan PEMDA untuk UMKM khusus perempuan; 55,56 % responden menyatakan terdapat tantangan bagi UMKM Perempuan dan 66,67 % responden menyatakan UMKM Perempuan merasa tidak terpinggirkan dan dianaktirikan dibandingkan dengan UMKM laki-laki

Namun pada umumnya dukungan bagi UMKM khusus perempuan masih sangat terbatas. Pada instansi tertentu yang terkait langsung dengan sektor pemberdayaan perempuan mempunyai KIE yang cukup baik, namun pada instansi lain yang hanya bersinggungan dengan UMKM secara umum atau instansi yang bersifat pendukung mempunyai KIE yang masih sangat minimal.

Alternatif Kebijakan dalam Persiapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan MEA

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa lembaga/instansi pemerintah daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, BPS, Koperasi, Bank, BPMKB dan UMKM/Asosiasi (yang bergerak di sektor industri rumahan) berpendapat bahwa upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro yang meliputi (1)

Penciptaan produk hukum dari pemerintah daerah yang memuat cetak biru pelaksanaan persiapan dan teknis kegiatan serta program yang dilaksanakan dalam menghadapi MEA 2015; (2) Peningkatan kualitas SDM pengelola UMKM melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha; (3) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (4) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (5) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin (6) Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat di pasar ASEA; (7) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) dan (8) membangun kerjasama kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil untuk peningkatan jejaring pemasaran produk UMKM. (9). Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha UMKM.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus lebih fokus pada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: 1) Pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM; 2) Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai *pilot project*. P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM; 3) Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/ *lending model* Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI); dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia dan 4) Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna dalam rangka pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia melakukan kajian identifikasi peraturan pusat dan daerah dalam rangka pengembangan UMKM serta kajian dan implementasi pilot project kluster pengembangan UMKM.

PEMETAAN KONDISI KESIAPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Kesiapan Indonesia dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih terkendala pada lemahnya berbagai bidang, antara lain, kesiapan Sumberdaya Manusia (khususnya UMKM), sarana dan prasarana produksi, modal usaha, infrastruktur wilayah, serta daya saing produk UMKM. Pemberlakuan kebijakan MEA itu dapat menjadi berkah ataupun sebaliknya malah mampu sebagai ancaman. Ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat khususnya UMKM dalam menghadapinya. Namun, hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah-masalah mendasar, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta stabilitas keamanan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap dalam Pelaksanaan MEA. Data menunjukkan bahwa posisi perdagangan luar negeri di Provinsi Jawa Timur dengan negara-negara di ASEAN tercatat surplus. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat neraca perdagangan dominan provinsi ini ke lima negara ASEAN. Perdagangan Jawa Timur ke Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Malaysia sampai saat ini masih *leading*. Contohnya, nilai ekspor non-migas Jawa Timur ke Malaysia pada Oktober 2015 sebesar US\$ 93,5 juta atau meningkat 9,65 persen di banding pada September yang hanya US\$ 85,2 juta. Untuk ekspor dari Januari-Oktober 2015, total senilai US\$ 891,2 juta atau naik 5,88 persen di banding Januari-Oktober 2014 sebesar US\$ 814,6 juta. Mayoritas barang-barang yang diekspor adalah komoditas industri, seperti elektronik, kertas, makanan, dan minuman.

Dalam rangka menggali berbagai permasalahan, kendala, serta memetakan sejauh mana kesiapan daerah khususnya provinsi Jawa Timur baik pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi MEA maka dalam telaahan ini dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak/stakeholder yang memangku kepentingan ataupun terkait dengan MEA. Di Provinsi Jawa Timur, FGD telah dilaksanakan di Kota Malang. Peserta terdiri dari berbagai unsur seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, BPMKB dan UMKM (7 Asosiasi yang bergerak di berbagai bidang industri rumahan).

Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya mempersiapkan berbagai langkah baik dalam bidang kebijakan daerah, sarana dan prasarana pengembangan usaha UMKM serta kegiatan dalam peningkatan kualitas baik kualitas produk UMKM maupun Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), baik SDM dari pihak pemerintah maupun SDM pengelola UMKM. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki cetak biru yang khusus membahas dan mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbagai usaha dan sosialisasi dalam rangka mempersiapkan MEA sebetulnya telah dilaksanakan dalam berbagai rapat, seminar maupun workshop di Provinsi Jawa Timur namun sampai saat ini belum diwujudkan dalam cetak biru yang spesifik dalam menghadapi MEA.

Terkait dukungan kebijakan/komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur : 56,14 % responden menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempunyai dukungan dalam bentuk kebijakan/komitmen dari pimpinan tertinggi dalam bentuk Perda/Surat Keputusan/Pedoman/Edaran, 71,43 % responden menyatakan bahwa telah melakukan usaha-usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan persiapan MEA pada UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung perangkat daerah (SKPD) maupun sektor usaha (UMKM) dalam rangka menghadapi MEA. Dukungan tersebut antara lain berupa dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung sektor UMKM dalam pengembangan usaha sehingga diharapkan dapat membantu kesiapan UMKM dalam menghadapi MEA. Sosialisasi terkait berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan MEA juga telah dilaksanakan dalam berbagai rapat lintas sektor dengan melibatkan UMKM di Provinsi Jawa Timur, dengan harapan masyarakat mengetahui, memahami dan siap dalam menghadapi MEA, serta dalam rapat tersebut dapat digali berbagai kebijakan dan langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk memperkuat berbagai potensi produk UMKM sehingga diharapkan siap dan mampu bersaing dengan produk luar negeri ketika nanti telah diberlakukan MEA.

Program/Kegiatan Pelaksanaan MEA

Berbagai instansi di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur pada umumnya masih memiliki kesulitan dalam mensosialisasikan persiapan MEA khususnya lingkup UMKM di wilayah dinas masing-masing. Namun demikian kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan antara lain oleh BAPPEDA dengan mengundang berbagai stakeholder terkait MEA dengan mengundang berbagai narasumber terutama terkait program dan kegiatan yang akan dipersiapkan dan dilaksanakan, dengan narasumber dari unsure kebijakan adalah DPRD dan BAPPEDA serta narasumber dari unsur teknis dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Terkait Program/Kegiatan Pelaksanaan MEA di Provinsi Jawa Timur : 71,43 % responden menyatakan bahwa ada program/kegiatan yang secara jelas mensosialisasikan pelaksanaan MEA ; 57,14 % responden menyatakan mengalami kesulitan dalam mencari informasi dalam pelaksanaan MEA dan 71,43 % responden menyatakan bahwa asosiasi sudah membuat jejaring PUG (Pengarus Utamaan Gender).

Dalam menghadapi MEA, Pemprov Jatim melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standarisasi produk barang dan jasa di Jatim. Kebijakan standarisasi produk barang dan jasa ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen menjadi perhatian penting pemerintah untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim. Tujuannya adalah mendorong kelancaran proses ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen.

Dukungan SDM dalam Persiapan MEA

Terkait dukungan SDM dalam persiapan MEA di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur terutama pada unsur pimpinan eselon 3 di berbagai dinas pada umumnya telah memahami kondisi MEA baik kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ditimbulkan MEA. Hal serupa juga dinilai sama pada sebagian besar pegawai di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada umumnya telah mengetahui keberadaan MEA. Namun pemahaman tersebut dirasakan belum merata, mengingat pada dinas/instansi yang banyak bersinggungan dengan MEA dinilai lebih memahami bila dibandingkan dengan pegawai pada dinas/instansi yang kurang bersinggungan langsung dengan MEA.

Terkait Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA di Provinsi Jawa Timur : 57,14 % responden menyatakan bahwa pimpinan asosiasi memahami MEA dan 57,14 % responden menyatakan sebagian besar pegawai di asosiasi memahami MEA. Pada masing-masing dinas di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada umumnya mempunyai penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan terkait MEA. Namun secara umum pimpinan asosiasi dan pegawai sampai saat ini belum sepenuhnya memahami MEA. Motor penggerak sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan MEA dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG), sedangkan pemberian layanan konsultasi/pendampingan tentang persiapan MEA pada UMKM khusus untuk perempuan dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB).

Ketersediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Ketersediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sangat diperlukan dalam memperlancar dan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan sosialisasi dan persiapan MEA di Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini tidak semua instansi/dinas memiliki jejaring KIE dalam rangka sosialisasi MEA. Hanya Dinas/instansi terkait langsung dengan UMKM yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang membawahi bidang UMKM yang memiliki jejaring KIE. Terkait Ketersediaan Media komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Provinsi Jawa Timur : 71,43 % responden menyatakan bahwa tidak ada KIE dari PEMDA dan 57,14 % responden menyatakan tidak ada media komunikasi dengan PEMDA. Jejaring tersebut difasilitasi melalui media komunikasi seperti internet serta media cetak yang jangkauannya masih terbatas pada internal dinas.

Kualitas Produk dan Dukungan Harga

Dukungan kualitas produk dan harga produk UMKM bagi kegiatan persiapan MEA di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada umumnya belum memenuhi standar kualitas produk internasional. Hal tersebut terjadi mengingat tidak semua produk yang dihasilkan oleh UMKM mampu bersaing dengan produk luar negeri karena dalam proses produksinya secara umum belum memiliki SOP yang baku. Selain itu juga UMKM memerlukan pendampingan dari dinas terkait maupun semua pihak sehingga UMKM memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik yang akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk dan strategi harga yang tepat dalam memenangkan persaingan dengan produk luar negeri.

Terkait Kualitas Produk dan Dukungan Harga produk UMKM di Provinsi Jawa Timur : 57,14 % responden menyatakan bahwa kualitas produk UMKM anggota asosiasi sudah baik, dan 57,14 % responden menyatakan bahwa harga belum dapat dijangkau. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Jejaring dalam Pemasaran

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Terkait Jejaring dalam pemasaran produk UMKM di Provinsi Jawa Timur : 100 % responden menyatakan bahwa jejaring pemasaran berada di wilayah dalam negeri, dan 14,29 % responden menyatakan memiliki jejaring pemasaran di luar negeri. Sampai saat ini tidak semua instansi di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki ketersediaan data UMKM dalam persiapan dan sosialisasi MEA. Hanya dinas terkait dan memiliki keterlibatan langsung dengan UMKM yang memiliki data. Dinas/instansi terkait tersebut antara lain Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi khususnya Kepada Bidang (KABID) koperasi dan UKM serta BAPPEDA. Hal tersebut tentu akan berpotensi dalam menghambat sosialisasi dan persiapan MEA 2015 serta berdampak pada sulitnya koordinasi program dan kegiatan antar dinas/instansi dalam upaya pengembangan UMKM dalam menghadapi MEA.

Jejaring Kemitraan Industri Rumahan

Kemampuan UMKM di Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri.

Terkait Jejaring Kemitraan UMKM di Provinsi Jawa Timur : 100 % responden menyatakan bahwa memiliki jejaring kemitraan di dalam negeri dan 14,29 % responden menyatakan bahwa memiliki jejaring kemitraan di luar negeri. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah

Dalam rangka menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015, masih banyak peluang UMKM untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Saat ini, struktur ekspor produk UMKM di Provinsi Jawa Timur banyak berasal dari industri pengolahan seperti furniture, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen, industri kayu dan rotan, hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan di sektor pertambangan masih sangat kecil (hanya yang berhubungan dengan yang batu-batuan, tanah liat dan pasir).

Terkait Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah di Provinsi Jawa Timur : Sejumlah 71,43 % responden menyatakan memiliki jejaring kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah. Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya kurangnya jejaring kemitraan antar UKM/asosiasi maupun antara Asosiasi dengan pemerintah, disamping itu kurangnya bahan baku yang mesti harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi pada beberapa UMKM. Disamping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya.

Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2015 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-12. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Terkait Kesiapan mental UMKM Anggota Asosiasi di Provinsi Jawa Timur untuk berkompetisi global : 57,14 % responden merasa takut; 71,43 % responden menyatakan tertantang; 57,14 merasa senang dan 85,71 % merasa tidak siap segalanya. Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi tantangan bagi kesiapan mental UMKM di Provinsi Jawa Timur adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi. Kemampuan UMKM

dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Pendampingan UMKM Perempuan

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai saat ini telah melakukan upaya pendampingan terhadap UMKM perempuan yang dimotori oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB). Upaya pendampingan tersebut antara lain dengan melakukan pembentukan kluster fhasion yang sebagian besar dilakukan/diusahakan oleh pengusaha perempuan.

Terkait Pendampingan UMKM Perempuan di Provinsi Sumatera Utara : 57,14 % responden menyatakan ada pendampingan PEMDA untuk UMKM khusus perempuan; 71,43 % responden menyatakan terdapat tantangan bagi UMKM Perempuan dan 57,14 % responden menyatakan UMKM Perempuan merasa tidak terpinggirkan dan dianaktirikan dibandingkan dengan UMKM laki-laki.

Alternatif Kebijakan dalam Persiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Dalam Pelaksanaan MEA

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian daerah khususnya Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam bidang penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa lembaga/instansi pemerintah daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, BPS, Koperasi, Bank, BPMKB dan UMKM/Asosiasi (yang bergerak di sektor industri rumahan) berpendapat bahwa upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro yang meliputi (1) Penciptaan produk hukum dari pemerintah daerah yang memuat cetak biru pelaksanaan persiapan dan teknis kegiatan serta program yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan MEA 2015; (2) Peningkatan kualitas SDM pengelola UMKM melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha; (3) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (4) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (5) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin (6) Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat di pasar ASEAN; (7) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) dan (8) membangun kerjasama kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil untuk peningkatan jejaring pemasaran produk UMKM. (9). Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha UMKM.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Berdasarkan identifikasi kondisi yang ada, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur telah siap menghadapi MEA. Hal tersebut dinilai mampu dilaksanakan mengingat hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM baik pemerintah maupun industri rumahan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Selain itu telah adanya dukungan dalam bidang kebijakan daerah dalam upaya persiapan dan sosialisasi serta pelaksanaan program dalam menghadapi MEA.

2. Berdasarkan identifikasi kondisi yang ada, industri rumahandi Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur secara umum dinilai telah siap dalam menghadapi MEA, mengingat saat ini industri rumahantelah mengetahui dan telah melakukan berbagai persiapan dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produk dalam menghadapi MEA.
3. Diperlukan pengoptimalan sinergitas kinerja semua instansi/lembaga baik pemerintah maupun sektor swasta terutama terkait pendampingan industri rumahandan khususnya industri rumahan Perempuan baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur khususnya dalam pengembangan usaha maupun perluasan jejaring pemasaran produk serta bantuan permodalan.
4. Dalam menghadapi MEA di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur diperlukan peningkatan intensitas dan perluasan sosialisasi serta pendampingan kepada industri rumahanbaik dalam aspek permodalan, produksi dan operasi, pengelolaan keuangan, jaringan pemasaran, jejaring kemitraan dan sebagainya, sehingga seluruh industri rumahan di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur sepenuhnya siap dalam menghadapi MEA.

REKOMENDASI

1. Perlunya kebijakan khusus/spesifik terkait perlindungan dan pengembangan industri rumahan dalam bentuk PERDA baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur khususnya terkait cetak biru dan program kegiatan serta penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dalam menghadapi MEA.
2. Perlunya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku industri rumahandari pemerintah daerah terkait dengan diversifikasi produk industri rumahanyang dihasilkan. Banyaknya sumberdaya dan potensi produk industri rumahandi Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur apabila ditopang dengan beragamnya produk yang dihasilkan akan sangat menguntungkan bagi pengembangan usaha.
3. Perlunya pendampingan dan fasilitasi kemudahan dalam mengupayakan legalitas usaha industri rumahan, baik bentuk usaha maupun legalitas produk. Sehingga industri rumahan dapat memenuhi persyaratan di bidang permodalan (bankable) serta mampu memenuhi standar kualitas serta tata administrasi dalam menghadapi pasar baik local maupun internasional.
4. Perlunya pengoptimalan dan kesinambungan dalam pendampingan industri rumahan khususnya industri rumahan perempuan, mengingat industri rumahan perempuan sangat rentan terhadap kestabilan usaha yang dipengaruhi posisi perempuan terkait fungsinya dalam keluarga.
5. Perlunya program pendampingan dalam pemasaran produk industri rumahan terutama pemasaran lingkup internasional (ekspor) mengingat industri rumahan banyak memiliki keterbatasan dalam tata administrasi ekspor serta kendala dalam bahasa internasional, dan saat ini masih mengandalkan jejaring usaha dan pemasaran produk di tingkat daerah maupun nasional.
6. Perlunya sinkronisasi dan kerjasama serta koordinasi antar dinas/instansi khususnya dalam ketersediaan data dan informasi serta dalam kegiatan pendampingan industri rumahandalam rangka peningkatan bantuan permodalan, peningkatan kuantitas serta kestabilan kualitas produk industri rumahansehingga mampu bersaing dan dapat diterima di pasar internasional khususnya pasar ASEAN.
7. Perlunya mendorong industri rumahanagar produk yang dihasilkan ber-SNI dan memiliki desain produk sesuai dengan standar pasar ASEAN. Pembinaan standarisasi dan desain produk industri pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI), diseminasi *Good Manufacturing Practice (GMP)*, diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, penerapan standar, peningkatan mutu produk, diseminasi Batik Mark, pelatihan desain produk, pelatihan manajemen, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk, bimbingan Gugus Kendali Mutu (GKM), serta bimbingan penerapan ISO pada industri rumahan.

8. Perlunya kebijakan terkait pengakuan terhadap existensi industri rumahan dan keberpihakan untuk keberlangsungannya.
9. Perlunya upaya peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan assosiasi.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan.

Penelitian yang berjudul TELAAHAN STAF AHLI MENTERI TENTANG "KESIAPAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN MEA-UTAMANYA MEKANISME JEJARING DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI RUMAHAN – STUDY KASUS DI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA TIMUR adalah bertujuan untuk menganalisis kesiapan provinsi dalam menghadapi MEA utamanya mekanisme jejaring dan pendampingan industri rumahan dan merumuskan rekomendasi upaya strategis, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesiapan provinsi dalam menghadapi MEA.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah membantu penyusunan laporan akhir ini. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk peningkatan kualitas laporan ini.

Bogor, Oktober 20`6

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Pra Kata	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tahapan dan Ruang Lingkup Telaahan	3
1.4. Hasil yang Diharapkan	3
1.5. Waktu	4
1.6. Pendanaan	4
BAB II. METODE TELAAHAN	5
2.1. Kerangka Pemikiran Konseptual	5
2.2. Tahapan Telaahan	6
2.3. Jenis dan Sumber Data	8
2.4. Metode Pengumpulan Data	9
2.5. Lokasi Telaahan	9
BAB III. HASIL TELAAHAN	10
3.1. Sekilas ASEAN Community	10
3.1.1. Pilar Komunitas Politik Keamanan	11
3.1.2. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN	11
3.1.3. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN	12
3.1.4. Kondisi ASEAN Community (MEA)	12
3.2. Industri dan Perempuan Pengusaha	15
3.2.1. Industri	15
3.2.2. Pengusaha	16
3.2.3. Perempuan dalam Industri	16
3.2.4. Pengembangan Kapasitas	19
3.3. Gender dan Ketidakadilan Gender	20
3.3.1. Budaya Patriarki	20
3.3.2. Peran Gender	21
3.3.3. Kesetaraan Gender	22
3.3.4. Isu-isu Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender (KKG)	23
3.4. Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumah	25
3.4.1. Industri Rumah	27
3.4.2. Bentuk-bentuk Kemitraan	29
3.5. Kesiapan Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Jawa Timur dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumah	31
3.5.1. Pemetaan Kondisi Kesiapan Provinsi Sumatera Utara	31

3.5.2. Alternatif Kebijakan dalam Persiapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan MEA	50
3.5.3. Pemetaan Kondisi Kesiapan Provinsi Jawa Timur	55
3.5.4. Alternatif Kebijakan dalam Persiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pelaksanaan MEA	74
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

No.	Deskripsi	Hal
Tabel 3.1.	Klafifikasi Industri Rumahan	28
Tabel 3.2.	Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah dalam Pelaksanaan MEA	33
Tabel 3.3.	Program/Kegiatan dalam Pelaksanaan MEA	36
Tabel 3.4.	Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA	38
Tabel 3.5.	Ketersediaan KIE dalam Persiapan MEA	39
Tabel 3.6.	Kualitas Produk dan Dukungan Harga	40
Tabel 3.7.	Jejaring dalam Pemasaran	41
Tabel 3.8.	Jejaring Kemitraan Industri Rumahan	43
Tabel 3.9.	Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah	44
Tabel 3.10.	Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global	45
Tabel 3.11.	Program Khusus Pendampingan UMKM Perempuan	46
Tabel 3.12.	Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah dalam Persiapan MEA	58
Tabel 3.13.	Program/Kegiatan dalam Persiapan MEA	61
Tabel 3.14.	Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA	62
Tabel 3.15.	Ketersediaan KIE dalam Persiapan MEA	63
Tabel 3.16.	Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan MEA	64
Tabel 3.17.	Jejaring dalam Pemasaran	65
Tabel 3.18.	Jejaring Kemitraan Industri Rumahan	66
Tabel 3.19.	Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah	67
Tabel 3.20.	Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global	69
Tabel 3.21.	Program Khusus Pendampingan UMKM Perempuan	70

DAFTAR GAMBAR

No.	Deskripsi	Hal
Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran Konseptual Kesiapan Daerah Provinsi dalam Menghadapi MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan	5
Gambar 2.2.	Diagram Alur Tahapan Telaahan Kesiapan Daerah Provinsi dalam Menghadapi MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan	6
Gambar 3.1.	ASEAN Community, One Vision, One Identity, One Community	10
Gambar 3.2.	Profil UMKM di Indonesia 2013	26
Gambar 3.3.	Bisnis Proses Pengembangan Industri Rumahan	29
Gambar 3.4.	Ekspektasi Pertumbuhan Bisnis UMKM di Tahun 2012	41

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Deskripsi	Hal
Lampiran 1.	PANDUAN PELAKSANAANFOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) ”Telaahan Kesiapan Provinsi Menghadapi MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur”	83
Lampiran 2.	ANGKET BAGI SKPD (INSTANSI PEMERINTAH DAERAH) ”Telaahan Kesiapan Provinsi Menghadapi MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur”	84
Lampiran 3.	ANGKET BAGI UMKM ”Telaahan Kesiapan Provinsi Menghadapi MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur”	88



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. Para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: (1) Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (2) Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (3) Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Melalui KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, para Kepala Negara ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*) dikenal dengan Bali Concord II. Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. *AEC Blueprint* merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. *AEC Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global



dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industry besar (UB), tetapi juga sektor UMKM karena kesamaan karakteristik produk. Menyadari peran UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan cukup dominan dalam perekonomian, maka pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut Indonesia dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang, Tahap RPJPN ke Tiga mengemban 8 misi dimana salah satunya yaitu misi ke 2 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 245 juta jiwa dan 49.1% adalah perempuan, dan 30% adalah anak-anak mempunyai peluang besar dalam MEA dengan populasi sekitar 600 juta. Hal ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Indonesia (laki-laki dan perempuan) untuk dapat eksis dan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat membentuk Komunitas ASEAN 2015 dengan 3 pilarnya yaitu: ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community. Untuk hal tersebut telah disusun Cetak Biru untuk masing-masing Pilar. Dalam konteks tersebut, Komunitas Ekonomi ASEAN, merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yaitu didasarkan pada kepentingan bersama negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas dengan prinsip-prinsip: ***ekonomi terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum*** agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki 5 elemen aliran bebas yaitu: ***aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal dan aliran bebas tenaga kerja terampil.***

Hasil survey pada tahun 2014 oleh Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan data bahwa total kegiatan UMKM di Indonesia mayoritas (60 persen) dikuasai oleh kaum pengusaha perempuan. Sehingga wanita pengusaha mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Industri rumahan merupakan salah satu kontributor



UMKM. Dalam konteks ini penting analisis tentang mekanisme jejaring dan pendampingan terhadap UMKM dan Industri rumahan melalui study kasus di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Timur yang diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan strategis di bidang industri rumahan.

1.2. Tujuan

Tujuan telaahan ini adalah:

1. Menganalisis kesiapan provinsi dalam pelaksanaan MEA utamanya mekanisme jejaring dan pendampingan industri rumahan
2. Merumuskan rekomendasi upaya strategis, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesiapan provinsi dalam Pelaksanaan MEA

1.3. Tahapan dan Ruang Lingkup Telaahan

1. **Tahapankegiatan:** 1) FGD Persiapan \$Telaahan; 2) Workshop/Seminar; 3) Pelaksanaan Kajian/Telaahan; 4) Presentasi hasil sementara dari Tim Kajian; 5) Perbaikan hasil masukan dan laporan akhir.
2. **Ruang Lingkup:** Kajian Kesiapan provinsi dalam Pelaksanaan MEA adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan provinsi baik dari sisi Kebijakan pemerintah daerah maupun kesiapan masyarakat utamanya terkait mekanisme jejaring dan pendampingan bagi UMKM dan industri rumahan setempat dalam dalam Pelaksanaan MEA. Kesiapan dapat dilihat dari analisis dengan membandingkan kajian literature dengan kondisi yang ada di sasaran kajian. Adakah dukungan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan; mekanisme jejaring yang ada, bagaimana pemahaman masyarakat setempat tentang MEA; adakah program prioritas daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah; serta bagaimana kesiapan para pelaku UMKM dan industri rumahan.

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Laporan hasil analisis kesiapan provinsi dalam dalam Pelaksanaan MEA di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi JawaTimur.
2. Rumusan Rekomendasi upaya strategis, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesiapanp rovinsi dalam MEA.



1.5. Waktu

Kajian dilakukan dalam kurun waktu bulan Mei s/d Oktober 2016

1.6. Pendanaan.

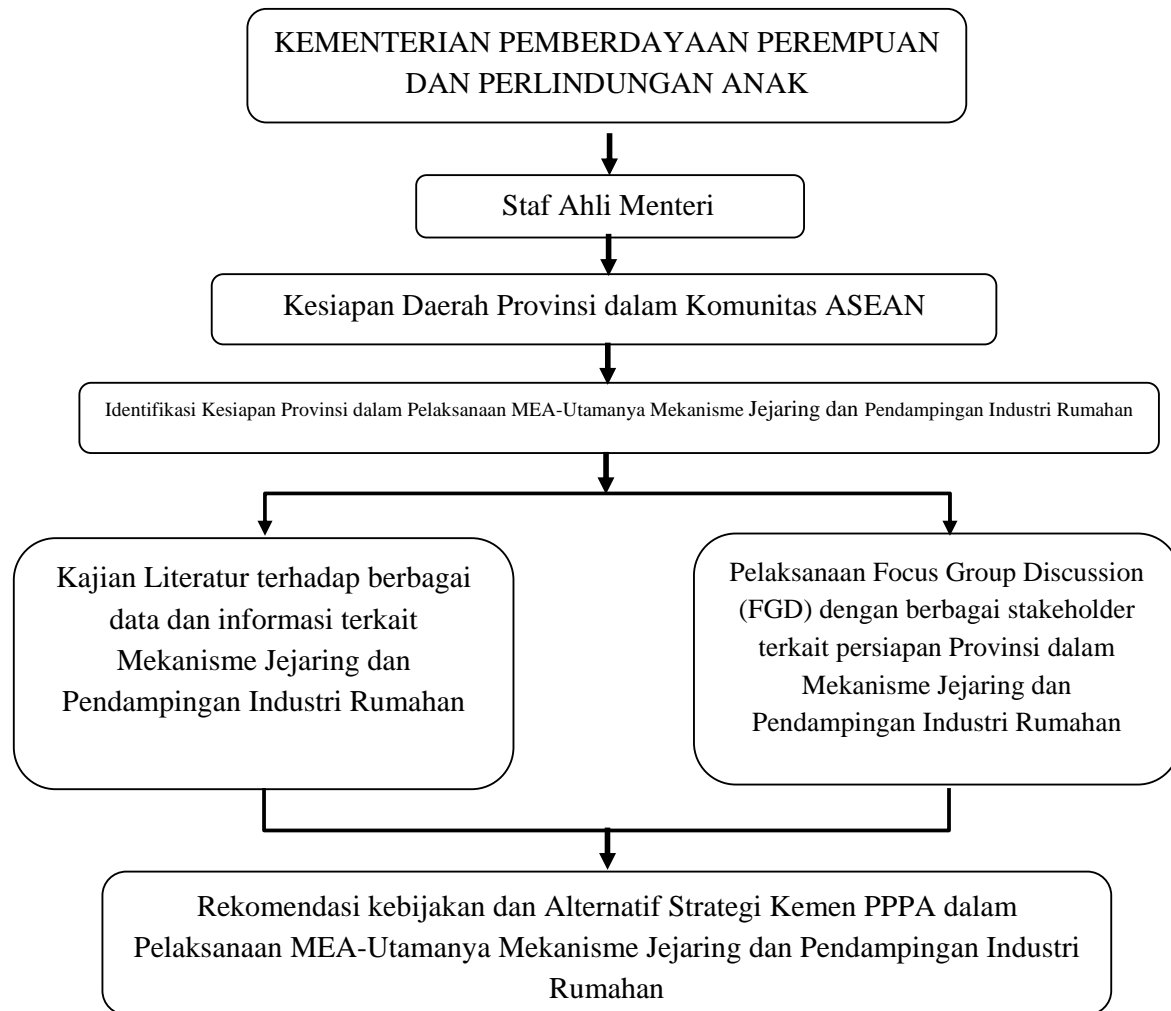
Kajian ini diselenggarakan dengan alokasi dana SAM Kementerian PPPA untuk Tahun Anggaran 2016.



BAB II. METODE TELAAHAN

2.1. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual dalam kegiatan "Telaahan Kesiapan Provinsi Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur" disampaikan sebagai berikut :

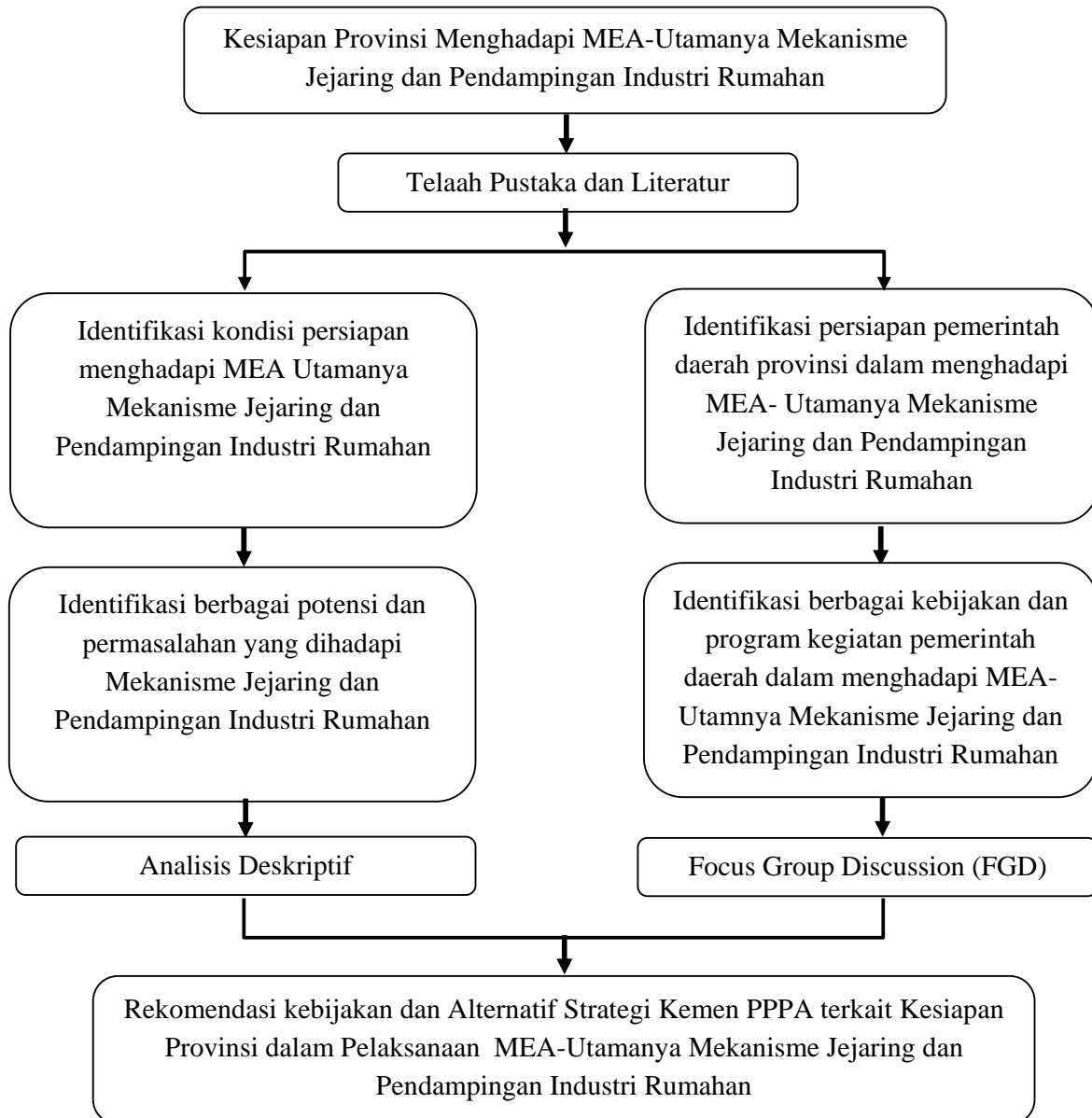


Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Konseptual Kesiapan Daerah Provinsi dalam Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan



2.2. Tahapan Telaahan

Diagram alur telaahan "Telaahan Kesiapan Provinsi Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Jawa Timur" disampaikan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Diagram Alur Tahapan Telaahan Kesiapan Daerah Provinsi dalam Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan



Telaahan dimulai dengan menentukan tujuan penelaahan. Studi berbagai literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka, buku, artikel/jurnal, baik dari media cetak maupun online dan berbagai kajian lainnya yang berkaitan dengan objek penelaahan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan teknik pengumpulan data, serta teknik yang akan digunakan dalam pengolahan dan analisis data.

Tahapan awal dilakukan pengamatan telaah pustaka dan studi literatur yang terkait, sehingga dapat diperoleh berbagai informasi mengenai: Kesiapan Daerah Provinsi dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, serta berbagai lembaga terkait lainnya.

Tahapan kedua adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai data dan informasi yang diperoleh terkait kegiatan Kesiapan Daerah Provinsi dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan. Identifikasi tersebut dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada berbagai pihak yang terkait dengan persiapan pemerintah daerah provinsi dalam dalam Pelaksanaan komunitas ASEAN.

Informasi dan masukan yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh UMKM serta berbagai SKPD pemerintah daerah tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistika deskriptif. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi Kesiapan Daerah Provinsi dalam Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan. Pengolahan data tersebut menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* versi 19.0. Sesuai dengan tujuan telaahan, setelah diperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi terkait Kesiapan Daerah Provinsi dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan, maka telaahan dilanjutkan dengan tahap ketiga.

Tahap ketiga adalah menyusun berbagai rekomendasi terkait upaya-upaya strategis yang dapat dikembangkan sebagai bentuk kontribusi Kemen PPPA terkait Kesiapan Daerah Provinsi dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan. Penyusunan strategi ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan analisis melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD). Penetapan pihak-pihak yang akan mengisi kuesioner yang didiskusikan dalam FGD tersebut dilakukan berdasarkan peran dan



fungsi yang dimiliki, maupun justifikasi terhadap pengalaman, kepakaran dan pengetahuan mengenai kondisi aktual terkait Komunitas ASEAN 2015.

Alternatif yang memperoleh nilai kesepakatan tertinggi berdasarkan indikator yang diisi dalam kuesioner, patut dipertimbangkan paling serius untuk ditindaklanjuti, meskipun rencana yang lainnya tidak berarti dikesampingkan dalam penyusunan rekomendasi terkait upaya-upaya strategis yang dapat dikembangkan sebagai bentuk kontribusi Kemen PPPA dalam memantau Kesiapan Daerah Provinsi dalam Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada telaahan ini meliputi data sekunder dan data primer dari beberapa samplingUMKM khususnya industri rumahanyang dikumpulkan di wilayah sampel.

Data yang akan dikumpulkan meliputi:

- a) Karakteristik usaha UMKM khususnya industri rumahan, termasuk UMKM yang dikelola oleh perempuan dan laki-laki.
- b) Identifikasi potensi dan permasalahan serta persiapan UMKM khususnya industri rumahan dalam menyongsong komunitas ekonomi ASEAN.
- c) Kondisi koordinasi antara UMKM khususnya industri rumahan dengan SKPD dan harapan yang diinginkan dalam mempersiapkan UMKM khususnya industri rumahan untuk menyongsong komunitas ekonomi ASEAN baik dari pendapat UMKM maupun pihak SKPD.
- d) Prioritas kebutuhan UMKM khususnya jejaring dan industri rumahanserta Respon SKPD dalam memenuhi kebutuhan UMKM.
- e) Rekomendasi berbagai alternatif kebijakan dan program bagi pemerintah provinsiuntuk mempersiapkan UMKM khususnya industri rumahan dalam menyongsong komunitas ekonomi ASEAN.
- f) Menyusun rekomendasi sinergisme Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kementerian/lembaga lainnya dalam mendorong peran UMKM khususnya industri rumahan dalam dalam Pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN.



2.4. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data menggunakan:

1. Studi Literatur terhadap berbagai data dan informasi terkait kegiatan UMKM khususnya industri rumahan dan pemerintah daerah provinsi dalam dalam Pelaksanaan MEA.
2. *Focus group discussion* (FGD) yang meliputi beberapa SKPD di wilayah sampel terpilih yang menangani UMKM khususnya industri rumahan. Dalam FGD ini juga diundang beberapa UMKM khususnya industri rumahan terpilih. Panduan FGD disajikan pada Lampiran 1.
3. Angket yang diisi oleh SKPD yang disajikan pada Lampiran 2.
4. Angket yang diisi oleh UMKM khususnya industri rumahan yang disajikan pada Lampiran 3.
5. *Indepth Interview* dari perwakilan SKPD dan indsutri rumahan.

2.5. Lokasi Telaahan

Lokasi kajian di Propinsi Sumatera Utara (di Kota Medan) JawaTimur (di Kabupaten Malang).



BAB III. HASIL TELAAHAN

3.1. Sekilas ASEAN Community

Sejak berdirinya di tahun 1967, ASEAN telah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan cita-cita pendirinya yaitu untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur.

Diawali kesepakatan Bali Concord 1, yang kemudian dilanjutkan ke Bali Concord 2 tahun 2003, disepakati bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Tujuan pembentukan Komunitas ASEAN adalah menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, makmur, stabil, memiliki hubungan kemitraan yang dinamis dan kepedulian yang tinggi. Komunitas ASEAN juga dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam dalam Pelaksanaan perkembangan peta politik internasional.

Semula Komunitas ASEAN dicanangkan akan dilakukan di 2020, namun melihat situasi internasional dan regional, serta optimisme dan antusiasme negara anggota ASEAN, maka pada KTT 12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, diputuskan bahwa pembentukan Komunitas ASEAN dipercepat menjadi 2015, melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.



Gambar 3.1. ASEAN Community, One Vision, One Identity, One Community

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Pilar Komunitas Ekonomi, dan Pilar Komunitas Sosial Budaya. Ketiga pilar Komunitas ASEAN ini terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan



perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama. Ketiga pilar Komunitas ASEAN tersebut adalah:

3.1.1. Pilar Komunitas Politik Keamanan

Tujuan pembentukan pilar ini adalah mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan dan tataran internasional. Komunitas ini menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai, serta tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer.

Beberapa instrumen dalam Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN di antaranya:

1. Zona bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara
2. Deklarasi Kawasan Damai, bebas dan Netral
3. Traktat Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara
4. Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN
5. Deklarasi-deklarasi antara ASEAN dan RRT dalam hubungannya dengan Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan beberapa anggota ASEAN dan RRC dan berpotensi konflik bila tidak dikelola dengan baik.

3.1.2. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN

Komunitas Ekonomi ASEAN dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni wilayah dengan tingkat pembangunan yang tinggi dan terintegrasi, pengentasan dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuannya, ada 4 basis karakteristik dari Komunitas Ekonomi ASEAN yang ingin diwujudkan, yaitu:

1. Sebagai Pasar Tunggal dan basis produksi regional
2. Sebagai kawasan yang memiliki daya saing tinggi
3. Sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi merata
4. Sebagai kawasan yang berintegrasi dengan ekonomi global.



3.1.3. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN

Komunitas Sosial Budaya ASEAN bersifat terbuka dan dinamis berdasarkan pendekatan kemasyarakatan (*people-centered approach*). Komunitas ini mencakup kerjasama yang luas dan multi sektor.

Kerjasama di bidang sosial- budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “*a caring and sharing community*”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN.

Untuk mewujudkannya, diperlukan rasa kekitaan (“*We Feeling*”) dari seluruh warga ASEAN agar dapat saling mengenal, menghormati, saling peduli akan keragaman budaya anggota ASEAN.

3.1.4. Kondisi ASEAN Community (MEA)

Pada tahun 1992 di Singapura, telah terjadi peristiwa bersejarah di kawasan Asia Tenggara, yaitu ditandatanganinya *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)* dalam KTT ASEAN oleh enam negara pelopor (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam dan Thailand). AFTA ini bertujuan sebagai batu loncatan untuk menciptakan pasar tunggal dan sebuah produksi dasar internasional, menarik investasi melalui *Foreign Direct Investments (FDIs)*, dan memperluas jaringan perdagangan dan investasi di dalam ASEAN.

Keenam negara tersebut memang sudah mengadaptasikan perjanjian tersebut yang pada dasarnya berisi penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Saat ini, enam negara ASEAN tersebut telah menghapus hambatan tarif sebesar 0% dari *Inclusion List* sebanyak 99,20% dan hanya 0,35% yang masih memiliki kewajiban import dalam *Inclusion List*. Kemudian, pada tahun 2015, semua negara ASEAN termasuk negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) akan memberlakukan perdagangan bebas pada kawasan ASEAN untuk keberlangsungan tercapainya *ASEAN Economic Community* atau integrasi ekonomi dari ASEAN pada tingkat lebih lanjut.

Indonesia memang telah menerapkan perdagangan bebas terhadap lima negara lainnya sejak tahun 1992. Jika dilihat secara garis besar mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015 nanti, dapat dikatakan Indonesia akan siap menghadapinya



mengingat meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini yang dapat dibuktikan dari kemampuan Indonesia dapat bertahan ketika dunia sedang dihantam krisis global sejak tahun 2008 dan hingga saat ini, negara-negara yang terkena dampak krisis masih mengalami pemulihan pasca-krisis, sedangkan perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan positif.

Kokohnya perekonomian Indonesia disaat krisis global tersebut disebabkan oleh GDP Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap ekspor karena peranan ekspor terhadap GDP hanya sebesar 10%, sehingga perlambatan perekonomian global tidak akan terlalu berdampak pada sektor riil. Ekspor netto (selisih antara ekspor terhadap impor) Indonesia dalam dua tahun terakhir sekitar USD 20 miliar, yang ekuivalen dengan 3% PDB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekspor ini menempati persentase yang relatif kecil, apalagi jika disejajarkan dengan besarnya pemasukan konsumsi rumah tangga yaitu yang mencapai angka 60%. Sisanya disumbang oleh investasi (30%) dan belanja pemerintah sebesar 7%.

Perekonomian Indonesia sejatinya bergantung pada konsumsi domestik. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Selain hal tersebut konsumsi domestik juga disebabkan oleh tiga hal, yaitu struktur demografi yang didominasi usia produktif sehingga lebih tahan pada pelemahan ekonomi, semakin terserapnya tenaga kerja ke sektor formal dan meningkatnya kelas menengah yang mendorong konsumsi rumah tangganya. Konsumsi domestik mengalami pertumbuhan mencapai 5,12% pada semester pertama 2013.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat. Menurut, laporan ekonomi utama tahunan ADB, *Asian Development Outlook (ADO 2013)* yang berisi prediksi tren ekonomi di kawasan ini, memproyeksikan bahwa Indonesia akan tumbuh sebesar 6,4% di 2013 dan melaju ke level 6,6% di 2014, yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Selain dari sektor konsumsi, pertumbuhan perekonomian Indonesia juga dari investasi yang mengalami peningkatan menjadi 9,8% pada 2012, yang didorong oleh membaiknya iklim investasi, rekor pertumbuhan ekonomi yang kuat beberapa tahun terakhir, dan peningkatan kredit. Sebagai hasilnya, rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi 33,2% dalam periode setidaknya 20 tahun terakhir.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Rakyat Indonesia seharusnya menyadari dan mengetahui terjadinya pertumbuhan perekonomian ini. Sehingga diharapkan, dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia juga diharapkan terjadi perbaikan terhadap



kelangsungan hidup warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perekonomian pada kelas menengah ke bawah, yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

UKM dalam hal ini memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. UKM dapat menyerap sebesar 97% tenaga kerja Indonesia, terutama dalam mikro ekonomi yang mencapai hampir 95% tenaga kerja. Dari pemaparan di atas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak disebutkan bahwa UKM memiliki kontribusi dalam PDB yang mencapai 4.303 triliun/tahun. Selain itu, untuk membangun perekonomian suatu negara, dibutuhkan SDM yang memiliki jiwa-jiwa *entrepreneur* untuk mengembangkan kewirausahaan suatu negara. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph A. Schumpeter, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Di Indonesia sendiri usaha mikro jumlahnya mencapai 98,82% dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,09%. Hal tersebut menandakan masih banyaknya usaha-usaha yang tergolong mikro dan tidak mengalami perkembangan berarti karena tidak adanya kenaikan level dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya.

Permasalahan utama dari UKM tersebut adalah kesiapan UKM Indonesia dalam menghadapi persaingan pada perdagangan bebas. Saat ini, UKM belum mendapat perhatian banyak untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, belum adanya sosialisasi yang memadai mengenai AFTA 2015, SDM yang banyak namun kurang berkualitas serta memiliki jiwa *entrepreneur* yang tinggi, kurangnya inovasi dalam menghasilkan produk, terbatasnya modal usaha, tidak adanya tujuan jelas yang akan diraih oleh para pelaku UKM, serta kurangnya keahlian maupun pengetahuan untuk mengembangkan usaha. Sifat konsumtif masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan kurang berkembangnya para pelaku UKM karena kalah bersaing dengan produk asing.

Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak kendala yang harus dibenahi dan menjadi bukan hanya tugas pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi tugas rakyat Indonesia. Solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan maupun pelatihan keahlian terhadap generasi muda maupun angkatan kerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan generasi muda maupun angkatan kerja dari negara lain. Pemerintah diharapkan dapat memiliki peranan besar dalam mensosialisasikan pentingnya UKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pengadaan lokakarya terhadap para pelaku UKM maupun pada masyarakat awam agar memiliki kemauan untuk berwirausaha. Perlunya



partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan wirausaha maupun untuk mendapatkan informasi mengenai *entrepreneurship*.

Pembangunan jiwa optimisme yang tinggi dalam diri masing-masing individu. Untuk permasalahan modal usaha, pemerintah dapat memberi sosialisasi pemberian pinjaman dana yang dapat dilakukan dengan mudah di bank maupun di koperasi . saat ini, masih banyak para pelaku UKM yang belum berani meminjam uang sebagai modal di bank maupun koperasi dengan anggapan prosedur yang banyak sehingga menyulitkan mereka meminjam uang. Membuat rencana pembangunan usaha untuk menetapkan tujuan melakukan wirausaha agar UKM dapat berkembang menjadi usaha yang lebih maju. Pemerintah juga harus mempermudah birokrasi dalam administrasi pemerintahan agar para pelaku UKM tidak kesulitan meraih modal maupun perizinan. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usahanya.

AFTA 2015 akan dihadapi oleh negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia kurang dari setahun. Catatan pertumbuhan perekonomian Indonesia mengatakan Indonesia mampu bersaing dalam perdagangan bebas tersebut dan perekonomian akan tetap tumbuh ke arah yang lebih positif. Namun, pertumbuhan perekonomian tersebut tidak dapat dilihat dalam hasil nyata saat ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku UKM terutama usaha mikro yang tidak berkembang ke tahap selanjutnya yang lebih baik. UKM sejatinya memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, namun pemerintah Indonesia masih kurang memberi perhatian terhadap UKM. Apabila hingga tahun 2015 ketika diberlakukannya perdagangan bebas UKM tidak mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, maka mereka harus bersiap untuk gulung tikar dan Indonesia harus siap untuk mengalami kegagalan perekonomian.

3.2 Industri dan Perempuan Pengusaha

3.2.1 Industri

Badan Pusat Statistik mengelompokkan kegiatan industri yang sudah terklasifikasi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, kegiatan industri pengolahan meliputi kegiatan industri besar dan sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri Besar mencakup kegiatan industri dengan tenaga kerja 100 orang dan lebih, Industri Sedang mencakup kegiatan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 - 99 orang. Industri Kecil dan Rumah tangga mencakup kegiatan industri kecil yang mempunyai tenaga kerja 5 -19 orang dan



industri rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja 1- 4 orang (Badan Pusat Statistik, 2008 : 33).

3.2.2 Pengusaha

Pengusaha adalah perseorangan atau rumah tangga yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial (BPS, 2008:4). Terdapat beberapa definisi pengusaha jika dirinci menurut skala usahanya, yaitu rumah tangga, kecil, menengah/sedang dan besar. Dalam laporan penelitian SMERU tentang Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat (2003) terdapat perbedaan definisi pengusaha dari berbagai instansi dan lembaga. BPS, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta ADB (*Asian Development Bank*) mendefinisikan pengusaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Departemen Keuangan dan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendefinisikannya berdasarkan omset. Adapun Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional mendefinisikannya berdasarkan asset yang dimiliki.

Dalam penelitian ini klasifikasi pengusaha menggunakan pendekatan yang umum digunakan di Indonesia yaitu berdasarkan tenaga kerja. Seseorang diklasifikasikan sebagai pengusaha rumah tangga jika memiliki tenaga kerja kurang dari empat orang. Pengusaha kecil jika memiliki tenaga kerja sebanyak 5 - 19 orang. Pengusaha menengah atau sedang jika memiliki tenaga kerja sebanyak 20 – 99 orang, dan diklasifikasikan sebagai pengusaha besar jika memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang (Grijns *et al*, 1994 : 4).

Machfud *et al* (1994 : 131 – 132) menyebutkan ada beberapa alasan perempuan terlibat menjadi pengusaha. Alasan pertama adalah karena tekanan ekonomi, yaitu memperoleh pendapatan untuk menambah penghasilan suaminya. Kedua adalah karena secara alamiah usaha tersebut sudah terbentuk dari orang tuanya sehingga mereka mewarisi usaha tersebut. Alasan ketiga adalah perempuan yang ingin menjalankan usaha pribadinya, biasanya suaminya memiliki pekerjaan lain dan mereka sendiri sudah memiliki pengalaman.

3.2.3 Perempuan dalam Industri

Dalam proses industrialisasi gender merupakan suatu kategori sosial yang sangat penting. Bagaimana jenis pekerjaan dinilai keterampilannya, bagaimana otoritas dan supervisi pada tempat kerja, bagaimana jenis pekerjaan dialami, bagaimana kesadaran dan pilihan politis, dan bagaimana tenaga kerja dipisahkan, semua dipengaruhi oleh gender. Dalam industrialisasi, pembagian kerja seksual bervariasi, tergantung pada posisi perempuan



dalam ekonomi seluruhnya dan dalam rumah tangga serta pada ideologi gender (Scott 1986, diacu dalam Saptari dan Holzner, 1997 : 263). menengah/ sedang dan besar.

Penelitian Sihite (2007) memperlihatkan pola pembagian kerja dalam proses industrialisasi. Pada awal industrialisasi, dimana produksi industri sangat intensif tenaga kerja perempuan ditarik masuk industri tekstil, kulit, dan pengolahan pangan. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan di pabrik dipelajari dalam sosialisasi mereka, seperti menjahit atau memasak. Setelah industrialisasi menjadi lebih intensif modal, lebih banyak laki-laki yang direkrut sebagai tenaga kerja dalam pabrik. Tetapi, dalam industrialisasi bertujuan ekspor tenaga kerja perempuan tidak diganti dengan mesin dan tenaga kerja laki-laki (Saptari dan Holzner, 1997:263).

Industrialisasi di pedesaan maupun perkotaan telah memperluas lingkup kerja, serta meningkatkan kompleksitas proses produksi. Bahkan dengan segala daya tariknya kegiatan industri ini telah mampu menggeser tenaga kerja dari pertanian ke industri, baik formal maupun informal. Berbagai studi pada tahun 1970-an menggambarkan kondisi keterlibatan perempuan dalam industri. Keterlibatan perempuan dalam industri di pedesaan diawali ketika permesinan memasuki bidang pertanian yang mengakibatkan tenaga-tenaga kerja perempuan tersingkir dari atau kian sempit kesempatannya untuk memasuki sektor pertanian, maka jumlah perempuan yang memasuki saluran penghidupan di luar sektor pertanian menjadi besar (Pudjiwati Sayogjo, 1985, 1993, diacu dalam Mulyanto, 2008:28).

Di banyak negara berkembang perpindahan perempuan dari sektor pertanian ke sektor industri lebih cepat daripada laki-laki. Pada tahun 1960 proporsi perempuan yang bekerja ada sektor industri sebesar 21,00 persen dan meningkat menjadi 26,50 persen pada tahun 1980. Pertumbuhannya semakin pesat ketika jumlah industri yang berorientasi ekspor telah diperluas (Bank Dunia, 2001 dalam Momsen, 2007 : 198). Secara garis besar ada tiga pandangan umum dalam literatur mengenai perempuan dan industrialisasi. *Pertama*, keterlibatan perempuan dalam industri telah mampu mengangkat derajat perempuan dan kerjanya ke dunia yang lebih kentara, mendobrak struktur patriarkal di dalam rumah dan keluarga, serta memberinya posisi tawar yang lebih baik. *Kedua*, keterlibatan perempuan dalam industri merupakan suatu hal negatif dan bersifat eksploitatif, karena upah yang rendah tidak adanya perbaikan upah dan kondisi kerja, hubungan dengan laki-laki sering bersifat patriarkal dan sering menjadi sasaran kekerasan seksual. *Ketiga*, keterlibatan perempuan dalam industri bisa terjadi pada pekerjaan yang sangat eksploitatif tetapi membawa perbaikan posisi sosial dan ekonomi bagi dirinya (Saptari dan Holzner, 1997 : 365-366).



Kebijakan industrialisasi, keadaan pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi lokal, serta ideologi tentang perempuan, ikut menentukan derajat keterlibatan perempuan dalam industri. Restrukturisasi industri mendorong usaha industri rumah tangga, kerja upahan di rumah (*homeworking*), sektor informal dan fleksibilitas dalam produksi (Ward, 1990 diacu dalam Ollenburger dan Moore, 2002:107). Clifford Geertz dalam kajiannya di suatu kota kecil di Jawa (Boserup, 1984 : 97) telah mengkaji bahwa terjadi perubahan dari produksi untuk keperluan rumah tangga menjadi industri rumah tangga yang menghasilkan barang-barang untuk dijual. Dalam pengkajiannya ini Geertz menemukan bahwa perempuan tidak hanya terlibat sebagai pekerja dalam industri rumah tangga tersebut, melainkan perempuanlah yang memulai dan meneruskan kegiatan industri tersebut.

Di banyak negara berkembang (seperti negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin, Marokko, dan Iran), perempuan merupakan bagian terbesar dalam angkatan kerja industri rumah tangga. Hal ini terjadi karena bagi perempuan yang biasa hidup dalam pingitan (kasus negara-negara tersebut) tidak ada jalan terbuka bagi perempuan untuk menghasilkan uang, terkecuali bekerja di industri rumah tangga (Boserup, 1984 : 98).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan lebih menyukai terlibat dalam kegiatan industri rumah tangga daripada kegiatan industri dalam pabrik. Jam kerja yang lebih luwes dalam industri rumah tangga merupakan keuntungan besar bagi perempuan yang telah berkeluarga, dan khususnya bagi perempuan yang mempunyai anak kecil. Melalui industri rumah tangga mereka masih bisa mengawasi anak-anaknya (Boserup, 1984:105). Hadjicostandi (1990, diacu dalam Ollenburger dan Moore, 2002 : 108) dalam penelitiannya di Kavala Yunani menyimpulkan bahwa masalah terpenting yang dihadapi oleh perempuan pekerja industri rumah tangga adalah jam kerja yang tidak teratur dan kebutuhan untuk mendapatkan alat-alat produksi. Berbeda dengan perempuan yang bekerja pada industri formal di kota, masalah pengasuhan anak merupakan masalah utama. Bekerja pada industri rumah tangga merupakan pilihan terbaik bagi perempuan yang memiliki anak kecil (Momsen, 2007 : 203).

Hasil penelitian Ihromi pada industri rumahan di Jawa Timur pada tahun 1990 menemukan bahwa pilihan bekerja pada industri rumahan oleh perempuan memiliki alasan-alasan tertentu. Sebanyak 80 persen responden perempuan memiliki alasan berkaitan dengan peran gender perempuan di ranah domestik (Ihromi, 1995:406). Alasan utama (35 persen) adalah perlunya mencari nafkah tanpa harus meninggalkan rumah, kemudian alasan kedua adalah sebagai perempuan mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga (31 persen). Alasan berikutnya adalah karena tidak adanya modal, baik uang, keterampilan, maupun



pendidikan (19 persen) dan terakhir berkaitan dengan peran gender pengasuhan anak (15 persen). Derajat keterlibatan perempuan dalam industri tersebut bervariasi menurut lokasi, jenis industri dan waktu. Oleh karena itu gender di dalam industrialisasi perlu diperhatikan per sektor, per wilayah, per kebijakan sebab memiliki hubungan yang berbeda-beda (Saptari dan Holzner, 1997:264). Sejak awal abad ke-20an industri telah menjadi hal penting bagi perempuan di Jawa Barat karena untuk industri sub sektor tertentu telah mempekerjakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki (Sayogyo dan Wahyuni, 1994 : 42).

Perempuan pengusaha harus membagi waktunya antara usaha dan rumah tangga. Oleh karena itu akses terhadap tenaga kerja keluarga menjadi penting sebagai substitusi pekerjaan domestik. Dua studi kasus yang dilakukan oleh Machfud *et al* (1994) menunjukkan bahwa keberadaan ibu atau anak perempuan membebaskan perempuan pengusaha dari pekerjaan domestik, sehingga memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi dalam usahanya (Machfud *et al*, 1994 : 138).

3.2.4 Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas didefinisikan oleh Morison (2001:42) seperti dikutip oleh Soeprapto dalam “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance*” (tanpa tahun) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Morison (2001:42) seperti diacu dalam Soeprapto (tanpa tahun) melihat pengembangan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

African Capacity Building Foundation/ACBF (2001), diacu dalam Soeprapto (tanpa tahun) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai sebuah proses untuk : meningkatkan kemampuan individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan juga masyarakat untuk menganalisa lingkungan mereka; mengenali masalah-masalah, kepentingan-kepentingan, dan kesempatan-kesempatan; merumuskan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan tersebut di atas serta untuk meraih kesempatan-kesempatan yang relevan; merancang sebuah rencana untuk program-program; memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar yang mendukung pelaksanaannya, memantau dan mengevaluasi rencana program-program; menggunakan arus balik untuk mempelajari pelajaran-pelajaran. Dalam penelitian ini pengembangan kapasitas yang dimaksud adalah proses untuk



meningkatkan kemampuan perempuan pengusaha dalam upaya mencapai tujuan yang dicitacitakannya dalam pengembangan usaha.

Observasi dari van Velzen (1990), diacu dalam Saptari dan Holzner (1997:324) menemukan bahwa pengembangan kapasitas pengusaha kecil berjalan seiring dengan perubahan pada kekuasaan gender. Lelaki mengambil alih tugas perempuan yang berkaitan dengan manajemen dan kontak dengan pihak luar. Perubahan ini terjadi dalam beberapa kasus karena kebijakan pemerintah yang menyediakan kursus pelatihan manajemen ditujukan pada laki-laki dalam pengembangan kapasitas. Van Velzen (1992) seperti diacu dalam Utrecht dan Sayogyo (1994 : 49) juga menemukan bahwa dalam upaya pengembangan kapasitas melalui pelatihan walaupun antara laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama, tingkat kehadiran perempuan sangat rendah.

3.3 Gender dan Ketidakadilan Gender

3.3.1 Budaya Patriarki

Sejak diperkenalkan kembali oleh kaum feminis radikal, istilah patriarki menjadi fokus perdebatan dan telah mengalami berbagai perubahan arti dan interpretasi. Sebagian feminis dari aliran sosialis menganggap patriarki sebagai istilah politis yang bisa dipakai untuk menggalang solidaritas perempuan, namun cenderung kaku, umum, dan cenderung berakar pada biologisme. Menurut feminis sosialis, analisis tentang patriarki sangat terpisah dari analisis tentang kerja dan kapitalisme (Barret,1980 dalam Saptari dan Holzner 1997:92).

Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga, yang berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat (pemerintahan, militer, pendidikan, ekonomi, industri, kesehatan, agama) dan pada dasarnya perempuan terhalangi dari akses terhadap kekuasaan tersebut (Mosse, 1996:65).

Mc Donough dan Harrison (1978), diacu dalam Saptari dan Holzner (1997:92) membedakan dua aspek dari patriarki, yaitu patriarki sebagai control terhadap reproduksi biologis dan seksualitas terutama dalam perkawinan monogami, serta patriarki sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistem pewarisan. Ada juga yang beranggapan bahwa patriarki bisa dilihat pada tingkat ideologi, sementara hubungan sosial belum tentu menunjukkan hubungan yang patriarkal.



3.3.2 Peran Gender

Adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan melahirkan seperangkat asumsi, perilaku sosial dan pranata yang berlaku dalam masyarakat. Mosse (2002:3) mendefinisikan gender sebagai perangkat peran yang menunjukkan kepada orang lain (masyarakat) mengenai sifat-sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seperangkat peran tersebut kemudian dilegalkan dan dilanggengkan oleh masyarakat melalui proses sosialisasi mengenai peranan yang sesuai untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan demikian peran gender adalah perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas, kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas, tugas dan tanggung jawab tertentu yang dipersepsikan sebagai peranan laki-laki dan perempuan sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya.

Pembagian kerja berdasarkan gender tersebut dipahami oleh para perencana pembangunan memiliki konsekuensi penting atas jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, pembagian kerja berdasarkan gender merupakan cara yang efisien untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kecenderungan yang tampak dalam pembangunan pada beberapa dasawarsa terakhir ini adalah laki-laki dilibatkan dalam sektor perekonomian modern sementara perempuan tetap berada di sektor domestik. Hal ini berakibat dalam menentukan otonomi dan kemandirian perempuan, terutama berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya bagi mereka.

Eviota (1992) dalam *The Political Economy of Gender, Women and the Sexual Division of Labour in the Philippines* diacu dalam Indraswari (2004) membagi peran (kerja) dalam dua tipe: “*that which is productive, or work for exchange, and that which is reproductive, or work for use and the satisfaction of immediate needs*” (yaitu produktif, atau kerja untuk pertukaran, dan yang reproduktif, atau kerja untuk digunakan dan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan mendesak). Menurut Eviota, peran produktif dan reproduktif keduanya berperan penting dalam proses bertahan (*survival*) dan pembaruan (*renewal*) manusia. Peran produktif merupakan peran yang menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidup anggotanya, seperti sandang, pangan, dan papan.

Peran reproduktif adalah peran (kerja) "memproduksi manusia". Edholm *et al* (1977), diacu dalam Saptari dan Holzner (1997:16) membedakan peran reproduktif menjadi *reproduktif biologis* (yaitu hamil, melahirkan, menyusui), *reproduktif tenaga kerja* (yang berarti sosialisasi dan pengasuhan anak- mempersiapkan mereka menjadi cadangan tenaga kerja berikutnya), dan *reproduktif sosial* (proses dimana hubungan produksi dan struktur



sosial terus direproduksi dan dilestarikan). Hakikat peran dan kerja perempuan biasanya dikaitkan terutama dengan peran reproduktif biologis dan reproduktif tenaga kerja, namun perempuan juga memegang peran dalam peran reproduktif sosial seperti peran dalam melestarikan status keluarga atau dalam kegiatan komunitas. Alat analisis untuk melihat pembagian peran gender di rumah tangga, digunakan Profil Aktifitas berdasarkan Kerangka Harvard.

3.3.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak seorang pun yang terabaikan kesempatan dan hak asasinya. Keduanya diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan. Kesetaraan gender artinya, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan karena jenis kelaminnya, sebaliknya laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan (Hanifah, 2001).

Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki merasakan status yang sama. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki persamaan kondisi untuk merealisasikan hak asasi mereka secara penuh dan berpotensi untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan untuk memanfaatkan hasil-hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu kesetaraan gender adalah persamaan nilai dalam masyarakat dari kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan berbagai bentuk peran yang mereka lakukan (Indian and Northern Affairs Canada, 1999). Hal ini juga berarti kesetaraan dari kesempatan dan sebuah masyarakat dimana perempuan dan laki-laki mampu untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup (Momsen, 2007 : 8).

Kesetaraan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, tidak benar anggapan bahwa gerakan kesetaraan gender merupakan upaya untuk merusak tatanan masyarakat yang telah baku. Yang benar adalah kesetaraan gender merupakan upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Kesetaraan gender layak untuk didukung siapa saja termasuk melalui kebijakan negara, seperti kebijakan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender artinya kebijakan yang mengharuskan negara mengintegrasikan perspektif gender dalam keseluruhan kebijakan (Tim Rifka Anisa, 2003).



3.3.4 Isu-isu Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender (KKG)

Ketidaksetaraan gender bisa saja berakar dalam ketimpangan hubungan gender tradisional, misalnya rendahnya akses perempuan terhadap penguasaan lahan pertanian atau adanya segregasi gender dalam industri modern (Wahyuni dan Sumarti, 2007 : 7). Manifestasi dari perbedaan peran gender akan muncul dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan masyarakat sebagai marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja lebih panjang, dan sosialisasi ideologi nilai gender (Fakih, 1999 dalam Wahyuni dan Sumarti, 2007 : 8).

3.3.4.1 Marginalisasi

Marginalisasi secara umum berarti proses penyingkiran. Terdapat beberapa pengertian marginalisasi yang masing-masing bisa dipusatkan pada aspek yang berbeda. Alan Scott seorang ahli sosiologi Inggris dalam Grijns *et al* (1994 : 12-13) mensinyalir berbagai bentuk marginalisasi, yaitu :

- a. Sebagai proses pengucilan (*exclusion*). Maksudnya adalah bahwa perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis-jenis kerja upahan tertentu.
- b. Sebagai proses pergeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dari pasar tenaga kerja. Maksudnya adalah kecenderungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kelangsungan hidup yang tidak stabil; yang upahnya rendah; atau yang dinilai tidak terampil.
- c. Sebagai proses feminisasi atau segregasi. Maksudnya adalah bahwa adanya pemusatan tenaga kerja perempuan terhadap jenis-jenis pekerjaan tertentu, atau dengan kata lain bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah ter-“feminisasi” (semata-mata hanya dikerjakan oleh perempuan).
- d. Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat Biasanya marginalisasi menunjuk pada ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Pearson (1992) seperti diacu dalam Saptari dan Holzner (1997:264) melihat pada tahun 1970-an ada konsensus di antara ilmuwan bahwa industri menyingkirkan perempuan (marginalisasi). Terutama ketika ada kebijakan untuk mensubstitusi barang impor mendorong industri berat yang intensif modal, dimana laki-laki bekerja. Setelah orientasi terhadap ekspor menjadi kebijakan industrialisasi, perempuan ditarik masuk pabrik tekstil, garmen, untuk pekerjaan yang intensif tenaga kerja.



3.3.4.2 Subordinasi

Subordinasi merupakan pandangan yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Menurut Murniati (2004) seperti dikutip oleh Avillia (2006:16) subordinasi adalah memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dipandang kurang mampu sehingga diberi tugas yang mudah dan ringan. Dalam hal ini digunakan istilah subordinasi (*subordination*) dan bukan penindasan (*oppression*) karena *oppression* oleh banyak ahli studi perempuan dianggap berkonotasi adanya unsur kesengajaan dan selalu menghasilkan dua kubu yang berlawanan, yaitu mereka yang menindas dan mereka yang tertindas.

Gerda Lerner seorang ahli sejarah Amerika Serikat seperti dikutip Saptari dan Holzner (1997:22-23) mengatakan : "Subordinasi tidak mempunyai konotasi adanya tujuan jahat dari pihak yang dominan, istilah ini memungkinkan adanya pembenturan antara yang dominan dengan yang subordinat. Di dalamnya termasuk pula penerimaan sukarela atas status yang subordinat dengan diperolehnya perlindungan sebagai gantinya... Kelebihan lain adalah bahwa sebab-sebab subordinasi tidak diasumsikan sebelumnya."

Dengan demikian subordinasi mempunyai konotasi yang lebih luas dan lebih kabur tentang sebab-sebab munculnya kondisi tersebut. Walaupun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pembagian kerja seksual telah dianggap sebagai suatu variabel pokok dalam analisis subordinasi perempuan (Beneria 1982, diacu dalam Saptari dan Holzner, 1997:23). Bentuk subordinasi perempuan diantaranya adalah bahwa perempuan bersikap emosional, lemah, setinggi-tingginya pendidikan dan pekerjaan perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur. Anggapan-anggapan yang merendahkan perempuan ini didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tanpa menganggap penting peran perempuan.

3.3.4.3 Beban Kerja

Heidi Hartman (1981) diacu dalam Ollenburger dan Moore (2002 : 119) menyatakan, tugas-tugas yang dilakukan oleh para suami dan istri memperjelas beban pekerjaan rumah tangga bagi perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, berakibat bahwa semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya beban kerja perempuan menjadi lebih panjang dan banyak. Jika perempuan juga memiliki pekerjaan lain di luar rumah maka beban kerja perempuan menjadi ganda. Bagi perempuan golongan miskin beban ganda ini dipikul sendiri oleh mereka, sedangkan bagi perempuan kaya mereka melimpahkan beban kerja tersebut kepada perempuan lain seperti pembantu rumah tangga (Wahyuni dan Sumarti, 2007 : 13).



3.4 MEKANISME JEJARING DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI RUMAHAN

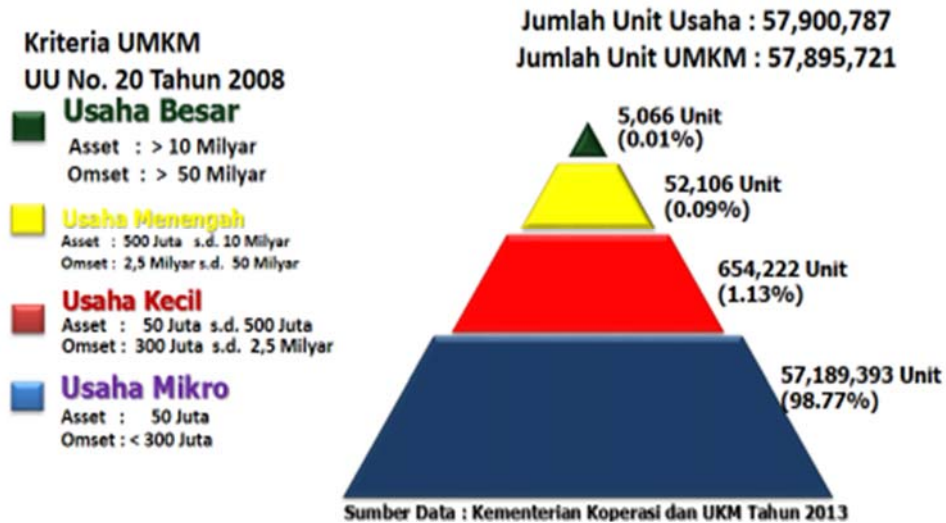
Terdapat definisi yang berbeda-beda mengenai usaha kecil menengah. Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan Usaha Kecil dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan dalam setahun tidak melebihi \$ 3 juta dan jumlah aset yang dimiliki tidak melebihi \$ 3 juta. *Sedangkan* Usaha Menengah didefinisikan sebagai usaha dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta dan jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta.

Di Indonesia, definisi usaha kecil menengah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Usaha Kecil. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 000 000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 000 000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 000 000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500 000 000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 000 000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2 500 000 000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha kecil atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:



- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 000 000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10 000 000 000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 500 000 000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50 000 000 000.00 (lima puluh milyar rupiah).



Gambar 3.2. Profil UMKM di Indonesia 2013

Berbeda dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang mendefinisikan UMKM berdasarkan asset dan pendapatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Menurut BPS, usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang. Sedangkan usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang dan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.



3.4.1. Industri Rumahan

Tambunan (2001) mengklasifikasikan industri rumahan ke dalam industri kecil yang didefinisikan sebagai kegiatan yang dikerjakan di rumah rumah penduduk, yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Sedangkan menurut Siahaan (1996) industri rumahan merupakan industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang dengan ciri ciri memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.

Bappeda (2014) mendefinisikan Industri rumahan sebagai suatu sistem produksi dari bahan baku tertentu untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai tambah dimana proses produksinya dikerjakan di lokasi rumah dan bukan pabrik. Bappeda (2014) menyebutkan ciri dari industri rumahan memiliki modal yang sangat terbatas dengan jumlah tenaga kerja berkisar antara 1-19 orang. Berdasarkan ciri tersebut, industri rumahan tergolong kedalam usaha mikro dan usaha kecil bila dilihat berdasarkan kriteria BPS, dimana usaha mikro merupakan entitas usaha yang miliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang dan usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, tentang pedoman umum pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan, industri rumahan adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. Proses produksi tersebut memanfaatkan prasarana, sarana, serta peralatan produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari industri rumahan berupa buatan tangan (hand made), bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, serta sering dikaitkan dengan kearifan local dan teknologi tepat sasaran.

Dalam konteks usaha mikro, kecil dan menengah, industri rumahan termasuk kelompok usaha mikro dimana banyak Negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar industri rumahan belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, industri rumahan biasanya dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. Industri rumahan bisa juga



berwujud kelompok usaha bersama yang terorganisir secara informal dan lentur dimana masing-masing anggotanya bekerja di rumah masing-masing, sehingga disepadankan dengan istilah industri rumah tangga.

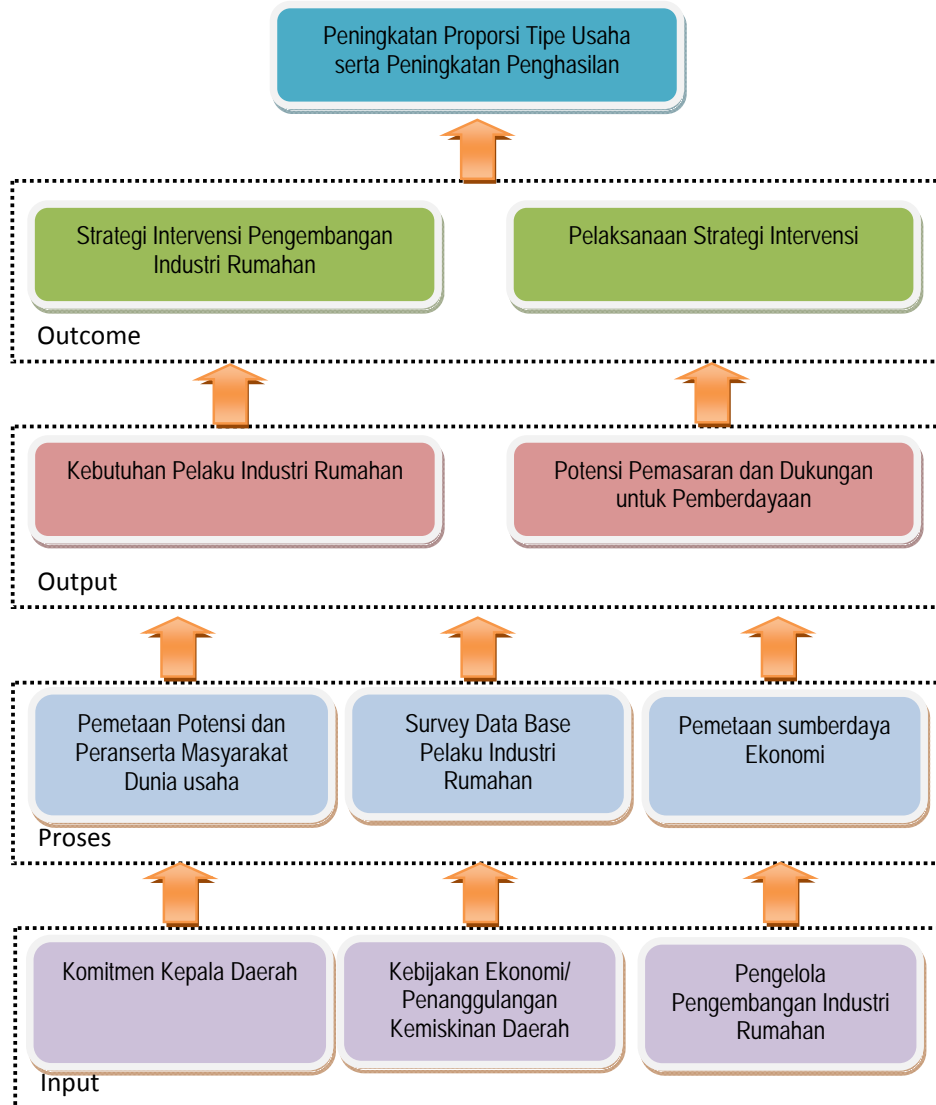
Tujuan pembangunan industri rumahan adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga serta mengembangkan industri kreatif yang menjadikan kekuatan perempuan dalam industri rumahan serta mendorong penguatan jaringan industri rumahan.

Sasaran pembangunan industri rumahan adalah usaha mikro yang dikelola oleh dan/atau menjadi tempat kerja kaum perempuan. Klasifikasi industri rumahan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan tingkat keberlanjutan usaha, besarnya modal, teknologi proses produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja, lama usaha, pola produk dan sistem penjualan produknya.

Tabel 3.1. Klafifikasi Industri Rumahan

Tenaga Kerja (orang)	Teknologi Produksi	Sumber Modal Usaha	Jumlah Modal (Juta-Rp)	Lama Usaha (Tahun)	Pola Produksi	Kelas Usaha
1-2	Manual	Sendiri	< 5	< 1	Tidak Kontinyu	Pemula
3-5	Semi Manual/ Teknologi Sederhana	Sendiri+ pinjaman dari LKM non formal	5 - 25	1 - 2	Semi Kontinyu	Berkembang
6-10	Teknologi Tinggi	Sendiri+ pinjaman dari LKM formal	25 - 50	> 2	Kontinyu	Maju

Dalam rangka menumbuhkembangkan industri rumahan, diperlukan suatu bisnis proses yang melibatkan lintas sektor yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3. Bisnis Proses Pengembangan Industri Rumahan

3.4.2. Bentuk-Bentuk Kemitraan

Pola kemitraan di Indonesia hingga detik ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung.

1. Pola keterkaitan langsung:

- a. Pertama, *Pola PIR* (Perkebunan Inti Rakyat), di mana Bapak Angkat (baca: usaha besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma.
- b. Kedua, *pola dagang*, di mana bapak angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya.



- c. Ketiga, *pola vendor*, di mana produk yang dihasilkan oleh anak angkat tidak memiliki hubungan kaitan ke depan maupun ke belakang dengan produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya. Sebagai contoh, PT Kratakau Steel yang *core business*-nya menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo.
 - d. Keempat, *pola subkontrak*, di mana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak dan bapak angkat dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, dan atau informasi.
2. Pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara "Pak Bina" dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pengabdian kepada masyarakat. Selama ini pola pembinaan lewat program ini meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasi bisnis, monitoring usaha, temu usaha, dan lokakarya/seminar usaha kecil.

Jalinan kemitraan harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu *saling membutuhkan dan saling membantu*. Kerja sama dapat berupa pengadaan bahan baku, kaitan pemasaran, bantuan modal atau dana, konsultasi dan bimbingan.



3.5. KESIAPAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PELAKSANAAN MEA-UTAMANYA MEKANISME JEJARING DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI RUMAHAN

3.5.1. PEMETAAN KONDISI KESIAPAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Kesiapan Indonesia dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara dalam dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih terkendala pada lemahnya baebagai badang, antara lain, kesiapan Sumberdaya Manusia (khususnya UMKM), sarana dan prasarana produksi, modal usaha, infrastruktur wilayah, serta daya saing produk UMKM. Pemberlakuan kebijakan MEA itu dapat menjadi berkah ataupun sebaliknya malah mampu sebagai ancaman. Ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat khususnya UMKM dalam menghadapinya. Namun, hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah-masalah mendasar, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta stabilitas keamanan.

Konsep MEA merupakan satu sistem ekonomi yang terintegrasi di dalam kawasan ASEAN. Tujuannya agar lebih maju, efisien, dan beberapa kebijakannya seperti penerapan pasar tunggal dan berbasis produksi regional, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi merata, dan terintegrasi dengan perekonomian dunia. Dalam MEA, siapa pun dari mana pun bisa hilir mudik ke Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia ke negara-negara Asean, untuk berjualan/membeli. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Bagaimana tidak, AFTA/MEA memungkinkan mobilitas manusia makin tinggi. Keterbukaan pintu negara bagi para pendatang dari Asia dan Asean, mau tidak mau akan bersentuhan langsung dengan para pelaku usaha sejak dari bandara, di perjalanan, penginapan, pasar, tempat wisata, dan lain-lainnya. Ada begitu banyak masyarakat Indonesia yang harus berinteraksi, berkomunikasi dengan warga negara asing, mulai dari kalangan birokrat, politisi, aparat penegak hukum, sopir taksi, kondektur, tukang ojek, tukang becak, sampai dengan ibu-ibu yang menjajakan dagangan mereka di pasar.

Hingga kini ada 6 masalah utama yang masih menjadi kendala bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing, yakni korupsi, akses terhadap pembiayaan, inflasi, birokrasi dan pemerintahan yang tidak efisien, lemahnya dukungan Infrastruktur, serta instabilitas kebijakan.

Mengutip survei WEF (World Economic Forum), Irman mengatakan, daya saing Indonesia pada tahun 2014 masih menempati urutan ke-34 di dunia. Sementara itu di



kawasan ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura (2), Malaysia (20), Thailand (31), namun di atas Philipina (52) dan Vietnam (68).

Penilaian itu didasarkan beberapa komponen yakni birokrasi di pusat maupun daerah, kualitas infrastruktur, makroekonomi, kualitas pendidikan dan layanan dasar, serta kualitas pendidikan tinggi maupun lembaga pelatihan. Tak hanya itu, ada pula efisiensi pasar barang dan pasar tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, market size, tingkat kecanggihan bisnis, serta inovasi.

Dalam rangka menggali berbagai permasalahan, kendala, serta memetakan sejauh mana kesiapan daerah khususnya provinsi Jawa Timur baik pemerintah maupun masyarakat dalam dalam Pelaksanaan MEA maka dalam telaahan ini dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak/stakeholder yang memangku kepentingan ataupun terkait dengan MEA. Di Provinsi Sumatera Utara, FGD telah dilaksanakan di Kota Medan. Peserta terdiri dari berbagai unsur seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, BPMKB dan UMKM (9 Asosiasi yang bergerak di berbagai bidang industri rumahan).

Berdasarkan hasil diskusi berupa saran, masukan, evaluasi, serta paparan kondisi lapang dari para stakeholder (pemangku kebijakan, kepentingan dan berbagai pihak terkait MEA) dalam kegiatan FGD di Provinsi Jawa Timur diperoleh pemetaan berbagai kondisi sebagai berikut.

3.5.1.1. Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya mempersiapkan berbagai langkah baik dalam bidang kebijakan daerah, sarana dan prasarana pengembangan usaha UMKM serta kegiatan dalam peningkatan kualitas baik kualitas produk UMKM maupun Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), baik SDM dari pihak pemerintah maupun SDM pengelola UMKM.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan



UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan.

Tabel 3.2. Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah dalam Pelaksanaan MEA

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah dalam pelaksanaan MEA di daerahsaudaramempunyai dukungan dalam bentuk kebijakan/komitmen dari pimpinan tertinggi dalam bentuk Perda/Surat Keputusan/Pedoman/Edaran?	6	3	66.67	33.33
2	Apakah Saudara melakukan usaha-usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan persiapan MEA pada UMKM Saudara?	5	4	55.56	44.44

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk didalamnya pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki cetak biru yang khusus membahas dan mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbagai usaha dan sosialisasi dalam rangka mempersiapkan MEA sebetulnya telah dilaksanakan dalam berbagai rapat, seminar maupun workshop di Provinsi Sumatera Utara namun sampai saat ini belum diwujudkan dalam cetak biru yang spesifik dalam menghadapi MEA.

Berdasarkan data Kementerian PPPA (2015), Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) telah dilengkapi dengan cetak biru (blueprint) yang mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan target waktu yang jelas. KEA mempunyai empat karakteristik utama yakni mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi



yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi setara, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Dalam menghadapi pembentukan KEA, salah satu kerja sama yang dikembangkan ASEAN adalah pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu dasar pertimbangannya adalah bahwa UKM mencakup sekitar 90% dari keseluruhan perusahaan di ASEAN. ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development 2004-2014*, yang bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, dan inovatif.

Berbagai instansi/dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya telah memiliki komitmen serta memahami berbagai peluang dan ancaman dengan dilaksanakannya MEA. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pengusulan program dan kegiatan dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka sosialisasi serta upaya peningkatan kualitas SDM serta kualitas produk UMKM. Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka persiapan dan sosialisasi MEA adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan advokasi baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini terkait kebijakan pengusulan APBD yang melibatkan berbagai program dan kegiatan dalam persiapan MEA.

Kegiatan advokasi lainnya dilaksanakan melalui pendekatan dengan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh daerah dengan harapan persiapan MEA tersebut didukung dan dipahami serta menjadi suatu kegiatan bersama yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Selain itu Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara pada umumnya telah berupaya membuat dan mempersiapkan jejaring baik dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi serta berbagai perusahaan untuk memperkuat kualitas SDM, Produk UMKM maupun sektor pemasaran produk UMKM dalam rangka persiapan MEA.

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara telah memiliki prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas daerah berupa program/kegiatan, pendampingan terhadap kegiatan UMKM melalui dinas terkait serta sektor perekonomian secara umum. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara juga telah mengupayakan memberikan pelayanan terhadap persiapan MEA baik berupa kegiatan pendampingan, pembentukan kelompok kerja, kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) serta sosialisasi melalui berbagai media komunikasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung perangkat daerah (SKPD) maupun sektor usaha (UMKM) dalam rangka dalam



Pelaksanaan MEA. Dukungan tersebut antara lain berupa dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung sektor UMKM dalam pengembangan usaha sehingga diharapkan dapat membantu kesiapan UMKM dalam Pelaksanaan MEA. Sosialisasi terkait berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan MEA juga telah dilaksanakan dalam berbagai rapat lintas sektor dengan melibatkan UMKM di Provinsi Sumatera Utara, dengan harapan masyarakat mengetahui, memahami dan siap dalam Pelaksanaan MEA, serta dalam rapat tersebut dapat digali berbagai kebijakan dan langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk memperkuat berbagai potensi produk UMKM sehingga diharapkan siap dan mampu bersaing dengan produk luar negeri ketika nanti telah diberlakukan MEA.

Peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBD untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Pada dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah Kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit atau Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

KUR merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Tujuannya adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri). Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah di bawah 10% sejak Januari hingga Mei 2011. Bank sentral terus mengarahkan bank untuk menggenjot kredit sektor produktif tersebut untuk mencegah ekonomi "overheating" alias kepanasan. BI membedakan kredit UMKM dan MKM karena bank saat ini tergolong masih banyak menyalurkan kredit MKM yang masih berbau konsumtif jika dibandingkan UMKM



yang bersifat produktif. UMKM itu murni digunakan untuk usaha, berbeda dengan MKM yang konsumtif, BI kini mendorong bank untuk lebih menyalurkan ke UMKM.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma yang cukup mendasar karena BI tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM berubah menjadi tidak langsung. Pendekatan yang digunakan kepada UMKM bergeser dari *development role* menjadi *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan kepada petugas bank, penelitian dan penyediaan informasi.

Untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah usaha kredit mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena Kesuksesan pemberdayaan UMKM akan terwujud bila semua stakeholder berperan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Baik regulator termasuk Pemerintah Daerah, para pelaku UMKM dan dunia perbankan yang dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan dan kemajuan UMKM akan cepat terlaksana. Sehingga pada akhirnya peningkatan penerimaan pajak dari sisi penggalan wajib pajak baru maupun nilai pajaknya akan terus meningkat.

3.5.1.2. Program/Kegiatan Pelaksanaan MEA

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara pada umumnya telah mempunyai berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi MEA kepada seluruh stakeholder. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan berbagai sektor yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi MEA untuk selanjutnya diadopsi pada Rencana Belanja (RENJA) Daerah.



Tabel 3.3. Program/Kegiatan dalam Pelaksanaan MEA

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah program/kegiatan yang secara jelas mensosialisasikan pelaksanaan MEA?	3	6	33.33	66.67
2	Apakah asosiasi Saudara mengalami kesulitan dalam mencari informasi dalam pelaksanaan MEA ?	5	4	55.56	44.44
3	Apakah asosiasi saudara sudah membuat jejaring PUG (PengaruhUtamaan Gender)	5	4	55.56	44.44

Berbagai instansi di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara pada umumnya masih memiliki kesulitan dalam mensosialisasikan persiapan MEA khususnya lingkup UMKM di wilayah dinas masing-masing. Namun demikian kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan antara lain oleh BAPPEDA dengan mengundang berbagai stakeholder terkait MEA dengan mengundang berbagai narasumber terutama terkait program dan kegiatan yang akan dipersiapkan dan dilaksanakan, dengan narasumber dari unsure kebijakan adalah DPRD dan BAPPEDA serta narasumber dari unsur teknis dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

3.5.1.3. Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA

Terkait dukungan SDM dalam persiapan MEA di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Utara terutama pada unsur pimpinan eselon 3 di berbagai dinas pada umumnya telah memahami kondisi MEA baik kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ditimbulkan MEA. Hal serupa juga dinilai sama pada sebagian besar pegawai di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada umumnya telah mengetahui keberadaan MEA. Namun pemahaman tersebut dirasakan belum merata, mengingat pada dinas/instansi yang banyak bersinggungan dengan MEA dinilai lebih memahami bila dibandingkan dengan pegawai pada dinas/instansi yang kurang bersinggungan langsung dengan MEA.



Tabel 3.4. Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah pimpinan asosiasi di tempat Saudara sudah memahami MEA?	4	5	44.44	55.56
2	Apakah sebagian besar pegawai yang ada di asosiasi Saudara memahami MEA?	3	6	33.33	66.67

Pada masing-masing dinas di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada umumnya mempunyai penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan terkait MEA. Namun secara umum pimpinan asosiasi dan pegawai sampai saat ini belum sepenuhnya memahami MEA. Motor penggerak sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan MEA dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG), sedangkan pemberian layanan konsultasi/pendampingan tentang persiapan MEA pada UMKM khusus untuk perempuan dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB).

3.5.1.4. Ketersediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Ketersediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sangat diperlukan dalam memperlancar dan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan sosialisasi dan persiapan MEA di Provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini tidak semua instansi/dinas memiliki jejaring KIE dalam rangka sosialisasi MEA. Hanya Dinas/instansi terkait langsung dengan UMKM yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang membawahi bidang UMKM yang memiliki jejaring KIE. Jejaring tersebut difasilitasi melalui media komunikasi seperti internet serta media cetak yang jangkauannya masih terbatas pada internal dinas.

Tabel 3.5. Ketersediaan KIE dalam Persiapan MEA

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah KIE dari PEMDA ?	7	2	77.78	22.22
2	Adakah Media Komunikasi dengan PEMDA ?	6	3	66.67	33.33



Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang ada harus mendukung 10 (sepuluh) prinsip dalam pembangunan industri rumahan, antara lain :

1. membangun motivasi perempuan untuk maju dan berkembang
2. mengembangkan potensi perempuan dari skala semula belum berkembang menjadi berkembang
3. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro untuk menjadi pengusaha kecil
4. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha dan membangun jejaring usaha
5. membangun kemampuan perempuan untuk memproduksi dan menghasilkan produk berkualitas
6. peningkatan komitmen pemerintah daerah dan stakeholder lainnya
7. harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah
8. memberdayakan sumberdaya lokal
9. mampu mendukung dalam pengembangan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas
10. mampu mendukung dalam pembangunan legalitas usaha mikro

3.5.1.5. Kualitas Produk dan Dukungan Harga

Dukungan kualitas produk dan harga produk UMKM bagi kegiatan persiapan MEA di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada umumnya belum memenuhi standar kualitas produk internasional. Hal tersebut terjadi mengingat tidak semua produk yang dihasilkan oleh UMKM mampu bersaing dengan produk luar negeri karena dalam proses produksinya secara umum belum memiliki SOP yang baku. Selain itu juga UMKM memerlukan pendampingan dari dinas terkait maupun semua pihak sehingga UMKM memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik yang akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk dan strategi harga yang tepat dalam memenangkan persaingan dengan produk luar negeri.



Tabel 3.6. Kualitas Produk dan Dukungan Harga

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah kualitas produk UMKM anggota asosiasi anda sudah baik	4	5	44.44	55.56
2	Apakah harga sudah dapat dijangkau	3	6	33.33	66.67

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

3.5.1.6. Jejaring dalam Pemasaran

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan.

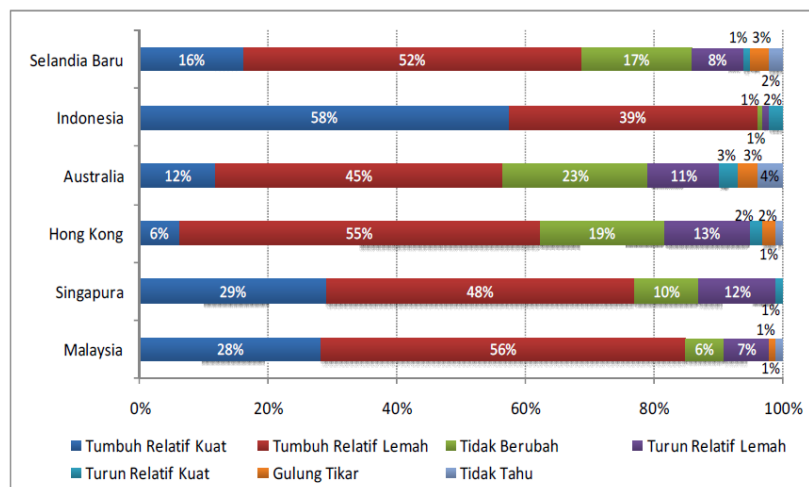


Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Tabel 3.7. Jejaring dalam Pemasaran

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Dalam Negeri	9	0	100.00	0.00
2	Luar Negeri	3	6	33.33	66.67

Gambar di bawah menginformasikan bahwa UKM di Indonesia memiliki ekspektasi pertumbuhan relatif kuat terbesar diantara negara-negara pembanding. Terhitung sebanyak 127 perusahaan UKM atau sekitar 58% cukup *confidence* melihat perspektif usahanya di tahun berikutnya. Sebanyak 85 (38%) perusahaan UKM di Indonesia juga memiliki ekspektasi pertumbuhan usaha positif (relatif lemah) di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya ekspansi usaha untuk mempercepat pertumbuhan UKM di Indonesia pada tahun 2012 lebih besar daripada di negara lain.



Gambar 3.4. Ekspektasi Pertumbuhan Bisnis UMKM di Tahun 2012

Sampai saat ini tidak semua instansi di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang memiliki ketersediaan data UMKM dalam persiapan dan sosialisasi



MEA. Hanya dinas terkait dan memiliki keterlibatan langsung dengan UMKM yang memiliki data. Dinas/instansi terkait tersebut antara lain Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi khususnya Kepada Bidang (KABID) koperasi dan UKM serta BAPPEDA. Hal tersebut tentu akan berpotensi dalam menghambat sosialisasi dan persiapan MEA 2015 serta berdampak pada sulitnya koordinasi program dan kegiatan antar dinas/instansi dalam upaya pengembangan UMKM dalam menghadapi MEA.

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan misalnya (1) jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu, (2) bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, (3) berapa harga pasar yang berlaku, (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional. Dengan demikian, UMKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif. Sedangkan informasi pasar faktor produksi juga diperlukan terutama untuk mengetahui : (1) sumber bahan baku yang dibutuhkan, (2) harga bahan baku yang ingin dibeli, (3) di mana dan bagaimana memperoleh modal usaha, (4) di mana mendapatkan tenaga kerja yang professional, (5) tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja, (6) di mana dapat memperoleh alat-alat atau mesin yang diperlukan.

Informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk membuat perencanaan usahanya secara tepat, misalnya : (1) membuat desain produk yang disukai konsumen, (2) menentukan harga yang bersaing di pasar, (3) mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses untuk memperluas jaringan pemasarannya. Selain memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. Selama ini promosi UMKM lebih banyak dilakukan melalui pameran-pameran bersama dalam waktu dan tempat yang terbatas, sehingga hubungan maupun transaksi dengan konsumen kurang bisa dijamin keberlangsungannya. Hal itu dapat disebabkan oleh jarak yang jauh atau kendala intensitas komunikasi yang kurang. Padahal faktor komunikasi dalam



menjalankan bisnis adalah sangat penting, karena dengan komunikasi akan membuat ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada, juga memungkinkan datangnya pelanggan baru.

3.5.1.7. Jejaring Kemitraan Industri Rumahan

Kemampuan UMKM DI Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar MEA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

Tabel 3.8. Jejaring Kemitraan Industri Rumahan

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Dalam Negeri	9	0	100.00	0.00
2	Luar Negeri	3	6	33.33	66.67

Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.



3.5.1.8. Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah

Kemampuan UMKM di Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri.

Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar MEA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT). Untuk itu sangat diperlukan dukungan kerjasama antara UMKM/Asosiasi dengan pemerintah agar tercipta sinergitas yang baik dalam pengembangan usaha dan perluasan pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

Tabel 3.9. Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah jejaring kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah	7	2	77.78	22.22

3.5.1.9. Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global

Perkembangan UMKM di Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula



menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM di Provinsi Sumatera Utara, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga *positioning* persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian nasional.

Tabel 3.10. Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Merasa takut	5	4	55.56	44.44
2	merasa tertantang	6	3	66.67	33.33
3	merasa senang	2	7	22.22	77.78
4	merasa siap segalanya	1	8	11.11	88.89

3.5.1.10. Pendampingan UMKM Perempuan

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sampai saat ini telah melakukan upaya pendampingan terhadap UMKM perempuan yang dimotori oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB). Upaya pendampingan tersebut antara lain dengan melakukan pembentukan kluster fhasion yang sebagian besar dilakukan/diusahakan oleh pengusaha perempuan.

Namun pada umumnya dukungan bagi UMKM khusus perempuan masih sangat terbatas. Pada instansi tertentu yang terkait langsung dengan sektor pemberdayaan perempuan mempunyai KIE yang cukup baik, namun pada instansi lain yang hanya



bersinggungan dengan UMKM secara umum atau instansi yang bersifat pendukung mempunyai KIE yang masih sangat minimal.

Tabel 3.11. Program Khusus Pendampingan UMKM Perempuan

NO	INDIKATOR	MEDAN		SUMATERA UTARA (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah pendampingan Pemda untuk UMKM khusus Perempuan?	4	5	44.44	55.56
2	Apakah tantangan UMKM Perempuan menurut saudara	5	4	55.56	44.44
3	Adakah UMKM Perempuan merasa terpinggirkan dan dianaktirikan dibandingkan dengan UMKM laki-laki?	3	6	33.33	66.67

Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat berbagai tantangan bagi UMKM khususnya UMKM berbasis pengusaha perempuan dalam MEA 2015 antara lain :

1. Belum adanya kaderisasi secara terstruktur dan berkesinambungan yang mampu menciptakan calon wirausahawan perempuan yang handal
2. Belum maksimalnya dukungan keluarga, karena pada umumnya keluarga beranggapan perempuan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebutuhan keluarga sebagai istri dan seorang ibu daripada sebagai pengusaha.
3. Belum adanya kepastian hukum dari pemerintah daerah terutama dalam perlindungan hukum khususnya bagi UMKM berbasis pengusaha perempuan, untuk kemudahan dalam pengembangan usaha.
4. Belum adanya kebersamaan/sinergi/koordinasi di antara department/lembaga terkait, pengembangan UMKM berbasis pengusaha perempuan sehingga masing-masing seakan-akan menjalankan program kegiatan masing-masing.
5. Belum adanya kemudahan biaya-biaya yang difasilitasi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM khususnya UMKM berbasis pengusaha perempuan .

Menurut data BPS, pada 2009 UKM menyumbang sekitar 53.3% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kebanyakan UKM tersebut bergerak di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan keuangan. Yang mengesankan, peran perempuan dalam pengembangan UKM Indonesia ternyata sangat signifikan. Sebagaimana dilaporkan MasterCard baru-baru ini, pertumbuhan UKM yang dimiliki perempuan di Indonesia ternyata



berada di peringkat ke tiga tertinggi di Asia Pasifik. Hal ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kaum perempuan, terutama di tengah upaya Pemerintah mendorong kewirausahaan sebagai salah satu sektor penggerak aktivitas ekonomi. Menurut World Bank (2008) sekitar 100 juta penduduk Indonesia hidup di bawah USD 2/orang/hari (PPP); sementara dengan garis kemiskinan nasional (yaitu sekitar Rp 230,000/orang/bulan), jumlah penduduk miskin kita sekitar 30 juta jiwa (BPS, 2012). Jumlah ini lebih banyak daripada seluruh penduduk Malaysia. Sekitar 92% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal atau tanpa kontrak (World Bank, 2012).

Indonesia masih membutuhkan sekitar 1 juta wirausaha baru untuk mencapai kebutuhan 2% penduduk sebagai wirausaha, mengingat pelaku UKM Indonesia sekitar 55 juta unit, di mana 98,82% merupakan usaha mikro (BPS, 2011) yang umumnya berorientasi usaha *survival* (bertahan), belum *entrepreneurial* (tumbuh dan berkembang). Dari aspek penyerapan tenaga Kerja, Usaha Mikro secara umum baru mempekerjakan diri sendiri, belum menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Selanjutnya sekitar 80% dari pelaku usaha mikro Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal (berbagai sumber).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013, pelaku usaha atau yang bergerak sebagai `entrepreneur` di Indonesia di bawah dua persen dari total penduduk, sedangkan pelaku usaha wanita masih di bawah 0,1 persen. Potensi wanita Indonesia untuk berkiprah di sektor usaha atau sebagai pembisnis cukup besar. Populasi wanita yang mencapai 49 persen dari total penduduk Indonesia merupakan potensi besar bagi kaum perempuan. Sebagian besar pelaku usaha wanita Indonesia bergerak di tingkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sebagian kecil bergerak di level menengah ke atas. Walaupun jumlahnya masih relative kecil, namun UMKM perempuan justru lebih tangguh dan terbukti sebagian besar dari mereka bertahan saat dihantam badai krisis tahun 1998 maupun tahun 2009 yang lalu.

Terdapat beberapa Kelemahan UMKM khususnya di Provinsi Sumatera Utara, antara lain

1. Sumber Daya Produktif

Akses terhadap sumberdaya produktif merupakan aset yang harus dimiliki pelaku bisnis khususnya UMKM. Akses terhadap sumberdaya produktif merupakan faktor yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan aktivitas bisnis. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hambatan UMKM dalam mengakses sumberdaya produktif terdapat pada pembiayaan dan pemasaran, jaringan bisnis dan teknologi. Kondisi tersebut memerlukan bantuan/fasilitasi sebagai upaya meningkatkan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif. Bentuk



fasilitasi yang dapat dilakukan adalah menyediakan pembiayaan dengan perlakuan tertentu, baik untuk investasi maupun modal kerja, yang memenuhi kriteria persyaratan mudah, mekanisme cepat, dan biaya murah.

Di samping itu, diperlukan fasilitasi yang diarahkan pada pengembangan jaringan bisnis UMKM agar UMKM dapat meningkatkan akses pasar produknya. Dalam era perdagangan bebas menuntut setiap pelaku bisnis memiliki akses yang cukup terhadap pasar untuk meningkatkan daya saingnya. Akses terhadap pasar merupakan kunci keberhasilan kegiatan pemasaran khususnya bagi produk UMKM yang sudah berorientasi ekspor.

UMKM di Provinsi Sumatera Utara memperoleh akses pasar ekspor melalui keikutsertaan pameran dan informasi dari mitra usahanya. Sedang sebagian kecil memperolehnya melalui media masa dan internet. Kondisi seperti uraian di atas, mengindikasikan bahwa UMKM masih memerlukan upaya untuk meningkatkan akses pasar ekspornya. UMKM dituntut untuk proaktif dalam mengakses pangsa pasar ekspor produknya. Dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya, UMKM memerlukan fasilitasi dari pihak lain, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar ekspor. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dalam kegiatan ekspor, terutama yang berkaitan dengan spesifikasi produk dan negara tujuan ekspor.

2. Adaptasi Produk

Pelaku UMKM dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen atau permintaan pasar, yang memiliki kecenderungan cepat berubah, sehingga peredaran suatu produk di pasar memiliki siklus yang relatif pendek. Hal ini akan lebih memacu kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk. Namun demikian, hal ini pun merupakan kelemahan yang dimiliki UMKM.

UMKM mengalami kesulitan dalam menghasilkan spesifikasi produk yang sesuai dengan perkembangan selera konsumen. Sebagian besar UMKM mengalami hambatan dalam desain produk dan kemasan, sedangkan sebagian kecil mengalami hambatan pada warna dan bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan UMKM mengalami hambatan dalam menghasilkan produk dan kreativitas untuk menghasilkan inovasi produk sesuai dengan selera konsumen. Karena itu, UMKM memerlukan pelatihan dan magang untuk meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk yang berdaya saing. UMKM memerlukan fasilitasi yang berkaitan dengan kebutuhan peralatan/teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Dengan demikian, UMKM memiliki kemampuan untuk menghasilkan diversifikasi produk, sehingga tidak bertumpu pada produk-produk tradisional yang memiliki keunggulan komparatif, seperti batik dan beberapa produk tekstil lainnya, serta produk makanan.

3. Kapasitas Produksi



Dalam memasarkan produknya, UMKM seringkali dihadapkan pada kemampuan menyediakan produk sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga terjadi kegagalan kontrak pesanan produk. Hal ini berkaitan dengan kapasitas produksi yang dimilikinya masih relatif rendah, padahal dari spesifikasi produk sudah memenuhi keinginan pembeli. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi UMKM sampel. Faktor - faktor tersebut antara lain ketersediaan modal, ketersediaan mesin / peralatan dan penguasaan teknologi, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Data di atas mengindikasikan bahwa hambatan kapasitas produksi pada UMKM masih terkait dengan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama sumber permodalan dan ketersediaan mesin/peralatan serta penguasaan teknologi. Hal tersebut makin menguatkan fenomena yang terjadi selama ini bahwa UMKM dihadapkan pada faktor kritis yang bersifat klasik, yang belum bergeser dari waktu ke waktu, yakni permodalan dan teknis produksi. Karena itu, seyogianya fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, diarahkan pada peningkatan kemampuan UMKM dalam mengatasi hambatan faktor-faktor tersebut.

4. Dokumen/Administrasi Pemasaran

Bagi UMKM yang sudah berorientasi ekspor, dokumen ekspor yang lengkap merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan ekspor. Dalam hal ini UMKM memiliki kesulitan untuk memenuhinya, sehingga menghambat kegiatan ekspornya. Berdasarkan data dari Laporan Konsultasi peserta pelatihan PPEI tahun 2013 dan laporan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Training of Exporter tahun 2013 diperoleh hambatan yang dialami terutama berkaitan dengan sertifikasi produk, letter of credit, legalitas usaha, dan lainnya. Hambatan ini terjadi karena selama ini UMKM tidak sungguh-sungguh untuk mengurus dokumen tersebut dan memberikan pengurusannya kepada perusahaan logistik. Beberapa alasan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya adalah UMKM merasakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur yang memakan waktu relatif lama, dengan biaya yang cukup memberatkan. Karena itu, perlu upaya untuk mengurangi hambatan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu dengan menerapkan persyaratan yang mudah, prosedur yang sederhana, dan biaya yang tidak memberatkan UMKM.

Beberapa aspek yang menjadi hambatan internal bagi UMKM dalam kegiatan pemasaran khususnya yang berorientasi ekspor adalah :

- a. Masih rendahnya komitmen UMKM dalam memenuhi pesanan pelanggan, baik lokal maupun mancanegara (on time delivery);
- b. Masih minimnya sistem manajemen yang diterapkan UMKM, khususnya dalam aspek produksi, administrasi, dan keuangan;



- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki UMKM dalam rangka memenuhi pesanan;
- d. Rendahnya kualitas SDM, sehingga dalam mengelola usahanya tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional;
- e. Terbatasnya modal yang dimiliki UMKM, khususnya modal kerja;
- f. Lemahnya jaringan komunikasi dan informasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dalam pengadaan bahan baku, terkadang UMKM hanya memiliki sumber terbatas, sehingga barang yang diperoleh harganya tinggi;
- g. Rendahnya kemampuan UMKM dalam riset dan pengembangan, sehingga belum memenuhi keinginan para pembeli.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan eksternal bagi UMKM, antara lain :

- a. Tidak stabilnya pasokan dan harga bahan baku serta bahan pendukung lainnya;
- b. Persyaratan dari buyer semakin tinggi, antara lain berkaitan dengan kualitas produk, kualitas lingkungan sosial, kualitas lingkungan kerja, harga yang bersaing, aspek ramah lingkungan;
- c. Masih adanya regulasi pemerintah yang kurang kondusif sehingga dapat menghambat laju ekspor UMKM;
- d. Rendahnya akses UMKM terhadap pasar, antara lain meliputi permintaan produk, standar kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan persaingan harga;
- e. Rendahnya akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, antara lain meliputi informasi skim kredit dan tingginya tingkat bunga;
- f. Masih munculnya biaya-biaya siluman yang berkaitan dengan transportasi, kepabeanan, dan keamanan;
- g. Kesulitan memenuhi prosedur dan jangka waktu yang relatif lama untuk mematenkan produk bagi UMKM

3.5.2. Alternatif Kebijakan dalam Persiapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan MEA

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam bidang penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa lembaga/instansi pemerintah daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan



Perdagangan, Dinas Koperasi, BPS, Koperasi, Bank, BPMKB dan UMKM/Asosiasi (yang bergerak di sektor industri rumahan) berpendapat bahwa upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro yang meliputi (1) Penciptaan produk hukum dari pemerintah daerah yang memuat cetak biru pelaksanaan persiapan dan teknis kegiatan serta program yang dilaksanakan dalam menghadapi MEA 2015; (2) Peningkatan kualitas SDM pengelola UMKM melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha; (3) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (4) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (5) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin (6) Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat di pasar ASEA; (7) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) dan (8) membangun kerjasama kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil untuk peningkatan jejaring pemasaran produk UMKM. (9). Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha UMKM.

Kelebihan lain UMKM di Provinsi Sumatera Utara terletak pada produksinya. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, UMKM kita sebagian besar tidak menggunakan bahan baku dari luar/impor sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga bahan baku impor, sehingga dapat menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu permodalan UMKM tidak menggunakan hutang dalam bentuk mata uang asing sehingga tidak terpengaruh perubahan kurs dan hal ini kurang berpengaruh terhadap cashflow perusahaan. Tenaga kerja dari UMKM berasal dari kalangan keluarga sendiri sehingga relatif terhindar dari pemutusan hubungan kerja, karena hubungan kekeluargaan diantara pemilik dan pekerja. UMKM di Indonesia juga dapat dengan cepat merubah jenis usaha dan fleksibel dalam melakukan diversifikasi usaha ketika bidang usaha yang sedang digeluti sedang mengalami guncangan. Namun demikian UMKM pada umumnya masih sangat terkendala pada tata kelola administrasi ekspor dan bahasa internasional yang digunakan. Minimnya pengetahuan tersebut akan sangat menghambat perkembangan pasar UMKM. Hal inilah yang harus segera disikapi pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan terutama pada pemasaran berorientasi ekspor, peningkatan kualitas pengusaha UMKM, pendampingan dalam penjaminan kualitas produk dan penguatan modal usaha.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus lebih fokus pada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan



kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM
- b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai *pilot project*. P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM.
- c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/*lending model* Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI); dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia.
- d. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna dalam rangka pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia melakukan kajian identifikasi peraturan pusat dan daerah dalam rangka pengembangan UMKM serta kajian dan implementasi pilot project klaster pengembangan UMKM.

Kebijakan pembangunan industri rumahan merupakan sistem pembangunan ekonomi daerah dan merupakan bagian dari kebijakan nasional dan sasaran pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatannya dalam pengembangan industri rumahan harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun strategi yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Strategi Pemberdayaan Wirausaha Perempuan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus berusaha mengembangkan kewirausahaan perempuan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui pembangunan industri rumahan yang responsive gender. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam strategi ini antara lain :



- a. kegiatan penyadaran potensi kewirausahaan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi kaum perempuan muda, ibu rumah tangga dan pelaku industri rumahan.
- b. Kegiatan pelatihan pemanfaatan peluang (peluang bahan baku, produksi, pasar, dsb)
- c. Kegiatan pengenalan peluang bisnis industri rumahan dengan sosialisasi dan pendekatan kelompok usaha bersama (KUBE), program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K), program pemberdayaan keluarga (P2K), dan perempuan Indonesia maju dan mandiri (Model Desa Prima), ataupun lanjutan dari kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan
- d. Kegiatan pembukaan jaringan kerja dan pasar yang potensial bagi produk-produk hasil wirausaha perempuan melalui promosi dan kampanye penggunaan produk-produk industri rumahan.

2. Strategi Peningkatan Model Bisnis

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus berusaha menumbuhkembangkan industri rumahan dari tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju secara bertahap melalui pendampingan berkelanjutan lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha (termasuk perbankan), LSM dan perguruan tinggi, hingga siap menjadi pengusaha kecil. Untuk itu kegiatan teknis yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain : 1) pemetaan industri rumahan untuk mendapatkan database regional untuk industri rumahan kelas pemula, berkembang dan maju. 2) analisa data industri rumahan, 3) sosialisasi hasil pendataan industri rumahan kepada lintas sektor/SKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. 4) pendampingan langsung kepada industri rumahan, sesuai dengan kebutuhannya melalui koordinasi dengan sektor/SKPD terkait, antara lain berupa pemberian insentif termasuk modal, alat produksi, pelatihan dan bimbingan teknis mutu produksi, pendampingan bisnis, pemasaran, layanan konsultasi bisnis, dan manajemen keuangan bagi proses pembelajaran untuk menjadi industri rumahan yang mampu dan bankable (mampu memenuhi persyaratan keuangan berdasarkan aturan perbankan).

3. Strategi integrasi dengan hasil pengembangan yang sudah dilakukan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan dapat mengintegrasikan pengembangan industri rumahan dengan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan seperti kegiatan pemberdayaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), KUBE (Kelompok Usaha Bersama) agar program pengembangan



industri rumahan tersebut mampu selaras dengan program kegiatan pemerintah lainnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal.

4. Strategi Pendukung

Dalam rangka mengembangkan pelaku industri rumahandari tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju, maka bersama lintas sektor terkait melaksanakan upaya strategis pendukung antara lain : 1) koordinasi dengan sektor/instansi terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan. 2) pemetaan wilayah kabupaten/kecamatan/desa dengan potensi industri rumahan yang besar dan luas. 3) pendampingan dalam pencarian mitra lokal bagi industri rumahan. 4) pengembangan aplikasi industri rumahan berbasis internet. 5) pendampingan industri rumahan pemula, berkembang dan maju untuk disiapkan menjadi pengusaha kecil serta 6) pengintegrasian pengembangan industri rumahan pada kebijakan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Adapun langkah-langkah kegiatan teknis yang dapat dilakukan pemerintah antara lain : 1) Pembentukan tim pengelola kebijakan pengembangan industri rumahan, baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota; 2) Pembuatan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan industri rumahan; 3) Melakukan koordinasi kegiatan pengembangan industri rumahan baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota; 4) Melakukan idenstifikasi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri rumahan; 5) Melakukan identifikasi terhadap modul-modul pelatihan bagi pengembangan industri rumahan; 6) Penetapan lokasi pengembangan industri rumahan; 7) Pelaksanaan survey pelaku industri rumahan; 8) Melaksanakan analisis hasil survey dan penyusunan desain intervensi atau desain kegiatan pengembangan industri rumahan; 9)Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan; 10) pelaksanaan kegiatan; 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.



3.5.3. PEMETAAN KONDISI KESIAPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Kesiapan Indonesia dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih terkendala pada lemahnya berbagai bidang, antara lain, kesiapan Sumberdaya Manusia (khususnya UMKM), sarana dan prasarana produksi, modal usaha, infrastruktur wilayah, serta daya saing produk UMKM. Pemberlakuan kebijakan MEA itu dapat menjadi berkah ataupun sebaliknya malah mampu sebagai ancaman. Ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat khususnya UMKM dalam menghadapinya. Namun, hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah-masalah mendasar, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta stabilitas keamanan.

Konsep MEA merupakan satu sistem ekonomi yang terintegrasi di dalam kawasan ASEAN. Tujuannya agar lebih maju, efisien, dan beberapa kebijakannya seperti penerapan pasar tunggal dan berbasis produksi regional, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi merata, dan terintegrasi dengan perekonomian dunia. Dalam MEA, siapa pun dari mana pun bisa hilir mudik ke Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia ke negara-negara Asean, untuk berjualan/membeli. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Bagaimana tidak, AFTA/MEA memungkinkan mobilitas manusia makin tinggi. Keterbukaan pintu negara bagi para pendatang dari Asia dan ASEAN, mau tidak mau akan bersentuhan langsung dengan para pelaku usaha sejak dari bandara, di perjalanan, penginapan, pasar, tempat wisata, dan lain-lainnya. Ada



begitu banyak masyarakat Indonesia yang harus berinteraksi, berkomunikasi dengan warga negara asing, mulai dari kalangan birokrat, politisi, aparat penegak hukum, sopir taksi, kondektur, tukang ojek, tukang becak, sampai dengan ibu-ibu yang menjajakan dagangan mereka di pasar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya siap dalam Pelaksanaan MEA. Diterapkannya MEA membuka peluang bagi Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan stabil (pertumbuhan ekonomi Jatim bahkan di atas rata-rata nasional), serta didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk berinvestasi. Apalagi dalam beberapa aspek terdapat perbaikan iklim investasi, seperti biaya perizinan yang makin murah, jumlah prosedur yang terus berkurang, dan waktu pengurusan yang makin cepat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap dalam Pelaksanaan MEA. Data menunjukkan bahwa posisi perdagangan luar negeri di Provinsi Jawa Timur dengan negara-negara di ASEAN tercatat surplus. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat neraca perdagangan dominan provinsi ini ke lima negara ASEAN. Perdagangan Jawa Timur ke Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Malaysia sampai saat ini masih *leading*. Contohnya, nilai ekspor non-migas Jawa Timur ke Malaysia pada Oktober 2015 sebesar US\$ 93,5 juta atau meningkat 9,65 persen di banding pada September yang hanya US\$ 85,2 juta. Untuk ekspor dari Januari-Oktober 2015, total senilai US\$ 891,2 juta atau naik 5,88 persen di banding Januari-Oktober 2014 sebesar US\$ 814,6 juta. Mayoritas barang-barang yang diekspor adalah komoditas industri, seperti elektronik, kertas, makanan, dan minuman.

Meski masih kalah bersaing dengan Thailand dan Singapura, Jawa Timur saya perkirakan mampu bersaing pada era MEA ini. Asalkan pola perdagangan mampu mempertahankan posisi surplus ke negara-negara yang sudah dikuasai tersebut. Jatim tidak perlu khawatir, karena Jawa Timur adalah salah satu pusat industri nasional. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia.

Dalam Pelaksanaan MEA, peningkatan daya saing merupakan keniscayaan untuk dapat memenangkan pertarungan. Tanpa peningkatan daya saing produsen lokal, produk-produk lokal akan kalah bersaing. Alih-alih untuk meningkatkan dan mengembangkan produk untuk diekspor, bersaing dalam pasar lokal dan domestik pun bakal mengalami kesulitan. Sebab produk-produk



negara pesaing yang berkualitas dan murah akan membanjiri pasar lokal dan domestik. Kita pun tidak lagi dapat memaksa masyarakat sebagai konsumen dengan romantisme seperti dalam iklan untuk memakai dan mencintai produk-produk lokal dan domestik, sebab masyarakat sudah semakin kritis dan memiliki preferensi.

Memasuki MEA memang diperlukan kesiapan yang lebih baik, guna mendapatkan keuntungan. Jika Jawa Timur mampu memanfaatkannya, perekonomian Jawa Timur khususnya akan mencapai kejayaan. Kejayaan dalam arti Jawa Timur sebagai bagian Indonesia yang berpengaruh dan dihormati dunia, khususnya ASEAN, karena mampu memanfaatkan semangat globalisasi. Semoga dalam menghadapi *Asean Community* ini, Jawa Timur khususnya bisa menata kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan tentu saja amanat reformasi tahun 1998. Pilihan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota adalah segera menetapkan “strategi perang” dalam bentuk kebijakan-kebijakan terpadu guna menciptakan iklim usaha yang meningkatkan daya saing

produsen lokal untuk mau dan mampu bersaing, baik di pasar lokal dan domestik maupun pasar global. Kebijakan-kebijakan terpadu dimaksud, diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala yang disebutkan di atas.

Hingga kini ada 6 masalah utama yang masih menjadi kendala bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing, yakni korupsi, akses terhadap pembiayaan, inflasi, birokrasi dan pemerintahan yang tidak efisien, lemahnya dukungan Infrastruktur, serta instabilitas kebijakan.

Pemberdayaan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Penilaian itu didasarkan beberapa komponen yakni birokrasi di pusat maupun daerah, kualitas infrastruktur, makroekonomi, kualitas pendidikan dan layanan dasar, serta kualitas pendidikan tinggi maupun lembaga pelatihan. Tak hanya itu, ada pula efisiensi pasar barang dan pasar tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, market size, tingkat kecanggihan bisnis, serta inovasi.



Dalam rangka menggali berbagai permasalahan, kendala, serta memetakan sejauh mana kesiapan daerah khususnya provinsi Jawa Timur baik pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi MEA maka dalam telaahan ini dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak/stakeholder yang memangku kepentingan ataupun terkait dengan MEA. Di Provinsi Jawa Timur, FGD telah dilaksanakan di Kota Malang. Peserta terdiri dari berbagai unsur seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, BPMKB dan UMKM (7 Asosiasi yang bergerak di berbagai bidang industri rumahan).

Berdasarkan hasil diskusi berupa saran, masukan, evaluasi, serta paparan kondisi lapang dari para stakeholder (pemangku kebijakan, kepentingan dan berbagai pihak terkait MEA) dalam kegiatan FGD di Provinsi Jawa Timur diperoleh pemetaan berbagai kondisi sebagai berikut.

3.5.3.1. Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya mempersiapkan berbagai langkah baik dalam bidang kebijakan daerah, sarana dan prasarana pengembangan usaha UMKM serta kegiatan dalam peningkatan kualitas baik kualitas produk UMKM maupun Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), baik SDM dari pihak pemerintah maupun SDM pengelola UMKM.

Tabel 3.12. Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemerintah dalam Persiapan MEA

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah dalam pelaksanaan MEA di daerahsaudaramempunyai dukungan dalam bentuk kebijakan/komitmen dari pimpinan tertinggi dalam bentuk Perda/Surat Keputusan/Pedoman/Edaran?	4	3	57.14	42.86
2	Apakah Saudara melakukan usaha-usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan persiapan MEA pada UMKM Saudara?	5	2	71.43	28.57



Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki cetak biru yang khusus membahas dan mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbagai usaha dan sosialisasi dalam rangka mempersiapkan MEA sebetulnya telah dilaksanakan dalam berbagai rapat, seminar maupun workshop di Provinsi Jawa Timur namun sampai saat ini belum diwujudkan dalam cetak biru yang spesifik dalam menghadapi MEA.

Berdasarkan data Kementerian PPPA (2015), Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) telah dilengkapi dengan cetak biru (blueprint) yang mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan target waktu yang jelas. KEA mempunyai empat karakteristik utama yakni mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi setara, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Dalam menghadapi pembentukan MEA, salah satu kerja sama yang dikembangkan ASEAN adalah pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu dasar pertimbangannya adalah bahwa UKM mencakup sekitar 90% dari keseluruhan perusahaan di ASEAN. ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development 2004-2014*, yang bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, dan inovatif.

Berbagai instansi/dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya telah memiliki komitmen serta memahami berbagai peluang dan ancaman dengan dilaksanakannya MEA. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pengusulan program dan kegiatan dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka sosialisasi serta upaya peningkatan kualitas SDM serta kualitas produk UMKM. Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka persiapan dan sosialisasi MEA adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan advokasi baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini terkait kebijakan pengusulan APBD yang melibatkan berbagai program dan kegiatan dalam persiapan MEA.

Kegiatan advokasi lainnya dilaksanakan melalui pendekatan dengan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh daerah dengan harapan persiapan MEA tersebut didukung dan dipahami serta menjadi suatu kegiatan bersama yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Selain itu Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur pada umumnya telah berupaya membuat dan mempersiapkan jejaring baik dengan berbagai



Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi serta berbagai perusahaan untuk memperkuat kualitas SDM, Produk UMKM maupun sektor pemasaran produk UMKM dalam rangka persiapan MEA.

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur telah memiliki prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas daerah berupa program/kegiatan, pendampingan terhadap kegiatan UMKM melalui dinas terkait serta sektor perekonomian secara umum. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur juga telah mengupayakan memberikan pelayanan terhadap persiapan MEA baik berupa kegiatan pendampingan, pembentukan kelompok kerja, kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) serta sosialisasi melalui berbagai media komunikasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung perangkat daerah (SKPD) maupun sektor usaha (UMKM) dalam rangka menghadapi MEA. Dukungan tersebut antara lain berupa dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung sektor UMKM dalam pengembangan usaha sehingga diharapkan dapat membantu kesiapan UMKM dalam menghadapi MEA. Sosialisasi terkait berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan MEA juga telah dilaksanakan dalam berbagai rapat lintas sektor dengan melibatkan UMKM di Provinsi Jawa Timur, dengan harapan masyarakat mengetahui, memahami dan siap dalam menghadapi MEA, serta dalam rapat tersebut dapat digali berbagai kebijakan dan langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk memperkuat berbagai potensi produk UMKM sehingga diharapkan siap dan mampu bersaing dengan produk luar negeri ketika nanti telah diberlakukan MEA.

3.5.3.2. Program/Kegiatan Pelaksanaan MEA

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur pada umumnya telah mempunyai berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi MEA kepada seluruh stakeholder. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan berbagai sektor yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi MEA untuk selanjutnya diadopsi pada Rencana Belanja (RENJA) Daerah.



Tabel 3.13. Program/Kegiatan dalam Persiapan MEA

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah program/kegiatan yang secara jelas mensosialisasikan pelaksanaan MEA?	5	2	71.43	28.57
2	Apakah asosiasi Saudara mengalami kesulitan dalam mencari informasi dalam pelaksanaan MEA ?	4	3	57.14	42.86
3	Apakah asosiasi saudara sudah membuat jejaring PUG (PengaruhUtamaan Gender)	5	2	71.43	28.57

Berbagai instansi di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur pada umumnya masih memiliki kesulitan dalam mensosialisasikan persiapan MEA khususnya lingkup UMKM di wilayah dinas masing-masing. Namun demikian kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan antara lain oleh BAPPEDA dengan mengundang berbagai stakeholder terkait MEA dengan mengundang berbagai narasumber terutama terkait program dan kegiatan yang akan dipersiapkan dan dilaksanakan, dengan narasumber dari unsure kebijakan adalah DPRD dan BAPPEDA serta narasumber dari unsur teknis dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

MEA yang mulai berlaku tahun 2015 tampaknya menjadi berkah bagi Provinsi Jatim. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur semua transaksi ke luar negeri baik barang maupun jasa khususnya ASEAN mengalami lonjakan. Dalam menghadapi MEA, Pemprov Jatim melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standarisasi produk barang dan jasa di Jatim. Kebijakan standarisasi produk barang dan jasa ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen menjadi perhatian penting pemerintah untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim. Tujuannya adalah mendorong kelancaran proses ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen ini salah satu bentuk pemerintah hadir dalam menjawab tantangan pemberlakuan MEA melalui kebijakannya. Pemerintah menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakatnya. Pemerintah juga hadir menjadi salah satu pemangku kepentingan untuk menghadapi ketatnya persaingan dengan negara lain. Ini



merupakan sinergitas *triple helick*, yakni; pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk akademisi agar bangsa ini memiliki daya saing yang tinggi.

3.5.3.3. Dukungan SDM dalam Persiapan MEA

Terkait dukungan SDM dalam persiapan MEA di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur terutama pada unsur pimpinan eselon 3 di berbagai dinas pada umumnya telah memahami kondisi MEA baik kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ditimbulkan MEA. Hal serupa juga dinilai sama pada sebagian besar pegawai di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada umumnya telah mengetahui keberadaan MEA. Namun pemahaman tersebut dirasakan belum merata, mengingat pada dinas/instansi yang banyak bersinggungan dengan MEA dinilai lebih memahami bila dibandingkan dengan pegawai pada dinas/instansi yang kurang bersinggungan langsung dengan MEA.

Tabel 3.14. Dukungan SDM dalam Pelaksanaan MEA

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah pimpinan asosiasi di tempat Saudara sudah memahami MEA?	4	3	57.14	42.86
2	Apakah sebagian besar pegawai yang ada di asosiasi Saudara memahami MEA?	4	3	57.14	42.86

Pada masing-masing dinas di pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada umumnya mempunyai penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan terkait MEA. Namun secara umum pimpinan asosiasi dan pegawai sampai saat ini belum sepenuhnya memahami MEA. Motor penggerak sosialisasi, pemberian layanan konsultasi/pendampingan MEA dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG), sedangkan pemberian layanan konsultasi/pendampingan tentang persiapan MEA pada UMKM khusus untuk perempuan dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB).



3.5.3.4. Ketersediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Ketersediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sangat diperlukan dalam memperlancar dan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan sosialisasi dan persiapan MEA di Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini tidak semua instansi/dinas memiliki jejaring KIE dalam rangka sosialisasi MEA. Hanya Dinas/instansi terkait langsung dengan UMKM yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang membawahi bidang UMKM yang memiliki jejaring KIE. Jejaring tersebut difasilitasi melalui media komunikasi seperti internet serta media cetak yang jangkauannya masih terbatas pada internal dinas.

Tabel 3.15. Ketersediaan KIE dalam Persiapan MEA

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah KIE dari PEMDA ?	5	2	71.43	28.57
2	Adakah Media Komunikasi dengan PEMDA ?	4	3	57.14	42.86

Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang ada harus mendukung 10 (sepuluh) prinsip dalam pembangunan industri rumahan, antara lain :

1. membangun motivasi perempuan untuk maju dan berkembang
2. mengembangkan potensi perempuan dari skala semula belum berkembang menjadi berkembang
3. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro untuk menjadi pengusaha kecil
4. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha dan membangun jejaring usaha
5. membangun kemampuan perempuan untuk memproduksi dan menghasilkan produk berkualitas
6. peningkatan komitmen pemerintah daerah dan stakeholder lainnya
7. harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah
8. memberdayakan sumberdaya lokal
9. mampu mendukung dalam pengembangan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas
10. mampu mendukung dalam pembangunan legalitas usaha mikro



3.5.3.5. Kualitas Produk dan Dukungan Harga

Dukungan kualitas produk dan harga produk UMKM bagi kegiatan persiapan MEA di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada umumnya belum memenuhi standar kualitas produk internasional. Hal tersebut terjadi mengingat tidak semua produk yang dihasilkan oleh UMKM mampu bersaing dengan produk luar negeri karena dalam proses produksinya secara umum belum memiliki SOP yang baku. Selain itu juga UMKM memerlukan pendampingan dari dinas terkait maupun semua pihak sehingga UMKM memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik yang akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk dan strategi harga yang tepat dalam memenangkan persaingan dengan produk luar negeri.

Tabel 3.16. Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan MEA

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah kualitas produk UMKM anggota asosiasi anda sudah baik	4	3	57.14	42.86
2	Apakah harga sudah dapat dijangkau	3	4	42.86	57.14

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

3.5.3.6. Jejaring dalam Pemasaran

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur



di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Tabel 3.17. Jejaring dalam Pemasaran

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Dalam Negeri	7	0	100.00	0.00
2	Luar Negeri	1	6	14.29	85.71

Demikian juga upaya-upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan serta pengetahuan dalam hal jejaring pemasaran pada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan (ref). Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di beberapa negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro

Sampai saat ini tidak semua instansi di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki ketersediaan data UMKM dalam persiapan dan sosialisasi MEA. Hanya dinas terkait dan memiliki keterlibatan langsung dengan UMKM yang



memiliki data. Dinas/instansi terkait tersebut antara lain Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi khususnya Kepada Bidang (KABID) koperasi dan UKM serta BAPPEDA. Hal tersebut tentu akan berpotensi dalam menghambat sosialisasi dan persiapan MEA 2015 serta berdampak pada sulitnya koordinasi program dan kegiatan antar dinas/instansi dalam upaya pengembangan UMKM dalam menghadapi MEA.

3.5.3.7. Jejaring Kemitraan Industri Rumahan

Kemampuan UMKM DI Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar MEA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

Tabel 3.18. Jejaring Kemitraan Industri Rumahan

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Dalam Negeri	7	0	100.00	0.00
2	Luar Negeri	1	6	14.29	85.71

Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk



memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

3.5.3.8. Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah

Dalam rangka menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015, masih banyak peluang UMKM untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Saat ini, struktur ekspor produk UMKM di Provinsi Jawa Timur banyak berasal dari industri pengolahan seperti furniture, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen, industri kayu dan rotan, hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan di sektor pertambangan masih sangat kecil (hanya yang berhubungan dengan yang batu-batuan, tanah liat dan pasir).

Tabel 3.19. Hubungan Antara Asosiasi dengan Pemerintah

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah jejaring kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah	5	2	71.43	28.57

Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya jejaring kemitraan antar UKM/asosiasi maupun antara Asosiasi dengan pemerintah, disamping itu kurangnya bahan baku yang mesti harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi pada beberapa UMKM. Disamping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya.



3.5.3.9. Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa timur adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) 2015 menempatkan pasar Indonesia pada *ranking* ke-12. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM di Provinsi Jawa Timur, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga *positioning* persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian nasional.



Tabel 3.20. Kesiapan Mental UMKM Anggota Asosiasi untuk Berkompetisi Global

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Merasa takut	4	3	57.14	42.86
2	merasa tertantang	5	2	71.43	28.57
3	merasa senang	3	4	42.86	57.14
4	merasa siap segalanya	1	6	14.29	85.71

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi tantangan bagi kesiapan mental UMKM di Provinsi Jawa Timur adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

3.5.3.10. Pendampingan UMKM Perempuan

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai saat ini telah melakukan upaya pendampingan terhadap UMKM perempuan yang dimotori oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB). Upaya pendampingan tersebut antara lain dengan melakukan pembentukan kluster fhasion yang sebagian besar dilakukan/dusahakan oleh pengusaha perempuan.

Namun pada umumnya dukungan bagi UMKM khusus perempuan masih sangat terbatas. Pada instansi tertentu yang terkait langsung dengan sektor pemberdayaan perempuan mempunyai KIE yang cukup baik, namun pada instansi lain yang hanya



bersinggungan dengan UMKM secara umum atau instansi yang bersifat pendukung mempunyai KIE yang masih sangat minimal.

Tabel 3.21. Program Khusus Pendampingan UMKM Perempuan

NO	INDIKATOR	MALANG		JAWA TIMUR (%)	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Adakah pendampingan Pemda untuk UMKM khusus Perempuan?	4	3	57.14	42.86
2	Apakah tantangan UMKM Perempuan menurut saudara	5	2	71.43	28.57
3	Adakah UMKM Perempuan merasa terpinggirkan dan dianaktirikan dibandingkan dengan UMKM laki-laki?	3	4	42.86	57.14

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai tantangan bagi UMKM khususnya UMKM berbasis pengusaha perempuan dalam MEA 2015 antara lain :

1. Belum adanya kaderisasi secara terstruktur dan berkesinambungan yang mampu menciptakan calon wirausahawan perempuan yang handal
2. Belum maksimalnya dukungan keluarga, karena pada umumnya keluarga beranggapan perempuan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebutuhan keluarga sebagai istri dan seorang ibu daripada sebagai pengusaha.
3. Belum adanya kepastian hukum dari pemerintah daerah terutama dalam perlindungan hukum khususnya bagi UMKM berbasis pengusaha perempuan, untuk kemudahan dalam pengembangan usaha.
4. Belum adanya kebersamaan/sinergi/koordinasi di antara department/lembaga terkait, pengembangan UMKM berbasis pengusaha perempuan sehingga masing-masing seakan-akan menjalankan program kegiatan masing-masing.
5. Belum adanya kemudahan biaya-biaya yang difasilitasi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM khususnya UMKM berbasis pengusaha perempuan .

Menurut data BPS, pada 2009 UKM menyumbang sekitar 53.3% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kebanyakan UKM tersebut bergerak di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan keuangan. Yang mengesankan, peran perempuan dalam pengembangan UKM Indonesia ternyata sangat signifikan. Sebagaimana dilaporkan MasterCard baru-baru ini, pertumbuhan UKM yang dimiliki perempuan di Indonesia ternyata



berada di peringkat ke tiga tertinggi di Asia Pasifik. Hal ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kaum perempuan, terutama di tengah upaya Pemerintah mendorong kewirausahaan sebagai salah satu sektor penggerak aktivitas ekonomi. Menurut World Bank (2008) sekitar 100 juta penduduk Indonesia hidup di bawah USD 2/orang/hari (PPP); sementara dengan garis kemiskinan nasional (yaitu sekitar Rp 230,000/orang/bulan), jumlah penduduk miskin kita sekitar 30 juta jiwa (BPS, 2012). Jumlah ini lebih banyak daripada seluruh penduduk Malaysia. Sekitar 92% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal atau tanpa kontrak (World Bank, 2012).

Indonesia masih membutuhkan sekitar 1 juta wirausaha baru untuk mencapai kebutuhan 2% penduduk sebagai wirausaha, mengingat pelaku UKM Indonesia sekitar 55 juta unit, di mana 98,82% merupakan usaha mikro (BPS, 2011) yang umumnya berorientasi usaha *survival* (bertahan), belum *entrepreneurial* (tumbuh dan berkembang). Dari aspek penyerapan tenaga Kerja, Usaha Mikro secara umum baru mempekerjakan diri sendiri, belum menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Selanjutnya sekitar 80% dari pelaku usaha mikro Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal (berbagai sumber).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013, pelaku usaha atau yang bergerak sebagai `entrepreneur` di Indonesia di bawah dua persen dari total penduduk, sedangkan pelaku usaha wanita masih di bawah 0,1 persen. Potensi wanita Indonesia untuk berkiprah di sektor usaha atau sebagai pembisnis cukup besar. Populasi wanita yang mencapai 49 persen dari total penduduk Indonesia merupakan potensi besar bagi kaum perempuan. Sebagian besar pelaku usaha wanita Indonesia bergerak di tingkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sebagian kecil bergerak di level menengah ke atas. Walaupun jumlahnya masih relative kecil, namun UMKM perempuan justru lebih tangguh dan terbukti sebagian besar dari mereka bertahan saat dihantam badai krisis tahun 1998 maupun tahun 2009 yang lalu.

Terdapat beberapa Kelemahan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur, antara lain

1. Sumber Daya Produktif

Akses terhadap sumberdaya produktif merupakan aset yang harus dimiliki pelaku bisnis khususnya UMKM. Akses terhadap sumberdaya produktif merupakan faktor yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan aktivitas bisnis. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hambatan UMKM dalam mengakses sumberdaya produktif terdapat pada pembiayaan dan pemasaran, jaringan bisnis dan teknologi. Kondisi tersebut memerlukan bantuan/fasilitasi sebagai upaya meningkatkan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif. Bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan adalah menyediakan pembiayaan dengan perlakuan tertentu, baik untuk



investasi maupun modal kerja, yang memenuhi kriteria persyaratan mudah, mekanisme cepat, dan biaya murah.

Di samping itu, diperlukan fasilitasi yang diarahkan pada pengembangan jaringan bisnis UMKM agar UMKM dapat meningkatkan akses pasar produknya. Dalam era perdagangan bebas menuntut setiap pelaku bisnis memiliki akses yang cukup terhadap pasar untuk meningkatkan daya saingnya. Akses terhadap pasar merupakan kunci keberhasilan kegiatan pemasaran khususnya bagi produk UMKM yang sudah berorientasi ekspor.

UMKM di Provinsi Jawa Timur memperoleh akses pasar ekspor melalui keikutsertaan pameran dan informasi dari mitra usahanya. Sedang sebagian kecil memperolehnya melalui media masa dan internet. Kondisi seperti uraian di atas, mengindikasikan bahwa UMKM masih memerlukan upaya untuk meningkatkan akses pasar ekspornya. UMKM dituntut untuk proaktif dalam mengakses pangsa pasar ekspor produknya. Dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya, UMKM memerlukan fasilitasi dari pihak lain, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar ekspor. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dalam kegiatan ekspor, terutama yang berkaitan dengan spesifikasi produk dan negara tujuan ekspor.

2. Adaptasi Produk

Pelaku UMKM dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen atau permintaan pasar, yang memiliki kecenderungan cepat berubah, sehingga peredaran suatu produk di pasar memiliki siklus yang relatif pendek. Hal ini akan lebih memacu kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk. Namun demikian, hal ini pun merupakan kelemahan yang dimiliki UMKM.

UMKM mengalami kesulitan dalam menghasilkan spesifikasi produk yang sesuai dengan perkembangan selera konsumen. Sebagian besar UMKM mengalami hambatan dalam desain produk dan kemasan, sedangkan sebagian kecil mengalami hambatan pada warna dan bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan UMKM mengalami hambatan dalam menghasilkan produk dan kreativitas untuk menghasilkan inovasi produk sesuai dengan selera konsumen. Karena itu, UMKM memerlukan pelatihan dan magang untuk meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk yang berdaya saing. UMKM memerlukan fasilitasi yang berkaitan dengan kebutuhan peralatan/teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Dengan demikian, UMKM memiliki kemampuan untuk menghasilkan diversifikasi produk, sehingga tidak bertumpu pada produk-produk tradisional yang memiliki keunggulan komparatif, seperti batik dan beberapa produk tekstil lainnya, serta produk makanan.

3. Kapasitas Produksi



Dalam memasarkan produknya, UMKM seringkali dihadapkan pada kemampuan menyediakan produk sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga terjadi kegagalan kontrak pesanan produk. Hal ini berkaitan dengan kapasitas produksi yang dimilikinya masih relatif rendah, padahal dari spesifikasi produk sudah memenuhi keinginan pembeli. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi UMKM sampel. Faktor - faktor tersebut antara lain ketersediaan modal, ketersediaan mesin / peralatan dan penguasaan teknologi, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Data di atas mengindikasikan bahwa hambatan kapasitas produksi pada UMKM masih terkait dengan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama sumber permodalan dan ketersediaan mesin/peralatan serta penguasaan teknologi. Hal tersebut makin menguatkan fenomena yang terjadi selama ini bahwa UMKM dihadapkan pada faktor kritis yang bersifat klasik, yang belum bergeser dari waktu ke waktu, yakni permodalan dan teknis produksi. Karena itu, seyogianya fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, diarahkan pada peningkatan kemampuan UMKM dalam mengatasi hambatan faktor-faktor tersebut.

4. Dokumen/Administrasi Pemasaran

Bagi UMKM yang sudah berorientasi ekspor, dokumen ekspor yang lengkap merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan ekspor. Dalam hal ini UMKM memiliki kesulitan untuk memenuhinya, sehingga menghambat kegiatan ekspornya. Berdasarkan data dari Laporan Konsultasi peserta pelatihan PPEI tahun 2013 dan laporan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Training of Exporter tahun 2013 diperoleh hambatan yang dialami terutama berkaitan dengan sertifikasi produk, letter of credit, legalitas usaha, dan lainnya. Hambatan ini terjadi karena selama ini UMKM tidak sungguh-sungguh untuk mengurus dokumen tersebut dan memberikan pengurusannya kepada perusahaan logistik. Beberapa alasan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya adalah UMKM merasakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur yang memakan waktu relatif lama, dengan biaya yang cukup memberatkan. Karena itu, perlu upaya untuk mengurangi hambatan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu dengan menerapkan persyaratan yang mudah, prosedur yang sederhana, dan biaya yang tidak memberatkan UMKM.

Beberapa aspek yang menjadi hambatan internal bagi UMKM dalam kegiatan pemasaran khususnya yang berorientasi ekspor adalah :

- a. Masih rendahnya komitmen UMKM dalam memenuhi pesanan pelanggan, baik lokal maupun mancanegara (on time delivery);
- b. Masih minimnya sistem manajemen yang diterapkan UMKM, khususnya dalam aspek produksi, administrasi, dan keuangan;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki UMKM dalam rangka memenuhi pesanan;



- d. Rendahnya kualitas SDM, sehingga dalam mengelola usahanya tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional;
- e. Terbatasnya modal yang dimiliki UMKM, khususnya modal kerja;
- f. Lemahnya jaringan komunikasi dan informasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dalam pengadaan bahan baku, terkadang UMKM hanya memiliki sumber terbatas, sehingga barang yang diperoleh harganya tinggi;
- g. Rendahnya kemampuan UMKM dalam riset dan pengembangan, sehingga belum memenuhi keinginan para pembeli.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan eksternal bagi UMKM, antara lain :

- a. Tidak stabilnya pasokan dan harga bahan baku serta bahan pendukung lainnya;
- b. Persyaratan dari buyer semakin tinggi, antara lain berkaitan dengan kualitas produk, kualitas lingkungan sosial, kualitas lingkungan kerja, harga yang bersaing, aspek ramah lingkungan;
- c. Masih adanya regulasi pemerintah yang kurang kondusif sehingga dapat menghambat laju ekspor UMKM; serta Rendahnya akses UMKM terhadap pasar, antara lain meliputi permintaan produk, standar kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan persaingan harga;
- d. Rendahnya akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, antara lain meliputi informasi skim kredit dan tingginya tingkat bunga;
- e. Masih munculnya biaya-biaya siluman yang berkaitan dengan transportasi, kepastian, dan keamanan; serta Kesulitan memenuhi prosedur dan jangka waktu yang relatif lama untuk mematenkan produk bagi UMKM

3.5.4. Alternatif Kebijakan dalam Persiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Dalam Pelaksanaan MEA

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian daerah khususnya Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam bidang penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa lembaga/instansi pemerintah daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, Dinas Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, BPS, Koperasi, Bank, BPMKB dan UMKM/Asosiasi (yang bergerak di sektor industri rumahan) berpendapat bahwa upaya untuk memberdayakan



UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro yang meliputi (1) Penciptaan produk hukum dari pemerintah daerah yang memuat cetak biru pelaksanaan persiapan dan teknis kegiatan serta program yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan MEA 2015; (2) Peningkatan kualitas SDM pengelola UMKM melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha; (3) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (4) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (5) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin (6) Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat di pasar ASEA; (7) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) dan (8) membangun kerjasama kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil untuk peningkatan jejaring pemasaran produk UMKM. (9). Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar dinas/instansi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan usaha UMKM.

Kelebihan lain UMKM di Provinsi Jawa Timur terletak pada produksinya. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, UMKM kita sebagian besar tidak menggunakan bahan baku dari luar/impor sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga bahan baku impor, sehingga dapat menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu permodalan UMKM tidak menggunakan hutang dalam bentuk mata uang asing sehingga tidak terpengaruh perubahan kurs dan hal ini kurang berpengaruh terhadap cashflow perusahaan. Tenaga kerja dari UMKM berasal dari kalangan keluarga sendiri sehingga relatif terhindar dari pemutusan hubungan kerja, karena hubungan kekeluargaan diantara pemilik dan pekerja. UMKM di Indonesia juga dapat dengan cepat merubah jenis usaha dan fleksibel dalam melakukan diversifikasi usaha ketika bidang usaha yang sedang digeluti sedang mengalami guncangan. Namun demikian UMKM pada umumnya masih sangat terkendala pada tata kelola administrasi ekspor dan bahasa internasional yang digunakan. Minimnya pengetahuan tersebut akan sangat menghambat perkembangan pasar UMKM. Hal inilah yang harus segera disikapi pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan terutama pada pemasaran berorientasi ekspor, peningkatan kualitas pengusaha UMKM, pendampingan dalam penjaminan kualitas produk dan penguatan modal usaha. Strategi selanjutnya adalah perkuatan perlindungan konsumen melalui standardisasi produk barang dan jasa di Jatim. Kebijakan standardisasi produk barang dan jasa ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.



Untuk standardisasi produk barang dan jasa yang dihasilkan UMKM di Provinsi Jawa Timur misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong UMKM agar produk yang dihasilkan ber-SNI dan memiliki desain produk sesuai dengan standar pasar ASEAN. Pembinaan standardisasi dan desain produk industri pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI), diseminasi *Good Manufacturing Practice (GMP)*, diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, penerapan standar, peningkatan mutu produk, diseminasi Batik Mark, pelatihan desain produk, pelatihan manajemen, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk, bimbingan Gugus Kendali Mutu (GKM), serta bimbingan penerapan ISO pada UMKM. Berbagai strategi dalam menghadapi MEA selain melakukan standardisasi barang dan jasa, strategi dilakukan melalui dukungan infrastruktur ekonomi, tersedianya kawasan industri, dukungan *soft* infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (*human development*), *government guarantee*, pembiayaan kompetitif melalui kredit linkage program untuk industri primer, dan pemasaran yang efektif melalui optimalisasi pasar domestik. Dukungan infrastruktur ekonomi dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur baik jalur darat (jalan arteri/tol, rel kereta api), jalur udara (bandar udara internasional dan domestik), jalur laut (pelabuhan baik internasional, domestik, dan alur pelayaran barat Surabaya).

Kebijakan pembangunan industri rumahan merupakan sistem pembangunan ekonomi daerah dan merupakan bagian dari kebijakan nasional dan sasaran pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatannya dalam pengembangan industri rumahan harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun strategi yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Strategi Pemberdayaan Wirausaha Perempuan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berusaha mengembangkan kewirausahaan perempuan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui pembangunan industri rumahan yang responsive gender. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam strategi ini antara lain :

- a. kegiatan penyadaran potensi kewirausahaan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi kaum perempuan muda, ibu rumah tangga dan pelaku industri rumahan.
- b. Kegiatan pelatihan pemanfaatan peluang (peluang bahan baku, produksi, pasar, dsb)



- c. Kegiatan pengenalan peluang bisnis industri rumahan dengan sosialisasi dan pendekatan kelompok usaha bersama (KUBE), program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K), program pemberdayaan keluarga (P2K), dan perempuan Indonesia maju dan mandiri (Model Desa Prima), ataupun lanjutan dari kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan
- d. Kegiatan pembukaan jaringan kerja dan pasar yang potensial bagi produk-produk hasil wirausaha perempuan melalui promosi dan kampanye penggunaan produk-produk industri rumahan.

2. Strategi Peningkatan Model Bisnis

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berusaha menumbuhkembangkan industri rumahan dari tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju secara bertahap melalui pendampingan berkelanjutan lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha (termasuk perbankan), LSM dan perguruan tinggi, hingga siap menjadi pengusaha kecil. Untuk itu kegiatan teknis yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain : 1) pemetaan industri rumahan untuk mendapatkan database regional untuk industri rumahan kelas pemula, berkembang dan maju. 2) analisa data industri rumahan, 3) sosialisasi hasil pendataan industri rumahan kepada lintas sektor/SKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 4) pendampingan langsung kepada industri rumahan, sesuai dengan kebutuhannya melalui koordinasi dengan sektor/SKPD terkait, antara lain berupa pemberian insentif termasuk modal, alat produksi, pelatihan dan bimbingan teknis mutu produksi, pendampingan bisnis, pemasaran, layanan konsultasi bisnis, dan manajemen keuangan bagi proses pembelajaran untuk menjadi industri rumahan yang mampu dan bankable (mampu memenuhi persyaratan keuangan berdasarkan aturan perbankan).

3. Strategi integrasi dengan hasil pengembangan yang sudah dilakukan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur disarankan dapat mengintegrasikan pengembangan industri rumahan dengan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan seperti kegiatan pemberdayaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), KUBE (Kelompok Usaha Bersama) agar program pengembangan industri rumahan tersebut mampu selaras dengan program kegiatan pemerintah lainnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal.

4. Strategi Pendukung

Dalam rangka mengembangkan pelaku industri rumahandari tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju, maka bersama lintas sektor terkait melaksanakan upaya



strategis pendukung antara lain : 1) koordinasi dengan sektor/instansi terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan. 2) pemetaan wilayah kabupaten/kecamatan/desa dengan potensi industri rumahan yang besar dan luas. 3) pendampingan dalam pencarian mitra lokal bagi industri rumahan. 4) pengembangan aplikasi industri rumahan berbasis internet. 5) pendampingan industri rumahan pemula, berkembang dan maju untuk disiapkan menjadi pengusaha kecil serta 6) pengintegrasian pengembangan industri rumahan pada kebijakan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Adapun langkah-langkah kegiatan teknis yang dapat dilakukan pemerintah antara lain : 1) Pembentukan tim pengelola kebijakan pengembangan industri rumahan, baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota; 2) Pembuatan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan industri rumahan; 3) Melakukan koordinasi kegiatan pengembangan industri rumahan baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota; 4) Melakukan identifikasi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri rumahan; 5) Melakukan identifikasi terhadap modul-modul pelatihan bagi pengembangan industri rumahan; 6) Penetapan lokasi pengembangan industri rumahan; 7) Pelaksanaan survey pelaku industri rumahan; 8) Melaksanakan analisis hasil survey dan penyusunan desain intervensi atau desain kegiatan pengembangan industri rumahan; 9) Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan; 10) pelaksanaan kegiatan; 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.



BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan identifikasi kondisi yang ada, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur telah siap menghadapi MEA. Hal tersebut dinilai mampu dilaksanakan mengingat hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM baik pemerintah maupun industri rumahan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Selain itu telah adanya dukungan dalam bidang kebijakan daerah dalam upaya persiapan dan sosialisasi serta pelaksanaan program dalam menghadapi MEA.
2. Berdasarkan identifikasi kondisi yang ada, industri rumahan di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur secara umum dinilai telah siap dalam menghadapi MEA, mengingat saat ini industri rumahan telah mengetahui dan telah melakukan berbagai persiapan dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produk dalam menghadapi MEA.
3. Diperlukan pengoptimalan sinergitas kinerja semua instansi/lembaga baik pemerintah maupun sektor swasta terutama terkait pendampingan industri rumahan dan khususnya industri rumahan Perempuan baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur khususnya dalam pengembangan usaha maupun perluasan jejaring pemasaran produk serta bantuan permodalan.
4. Dalam menghadapi MEA di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur diperlukan peningkatan intensitas dan perluasan sosialisasi serta pendampingan kepada industri rumahan baik dalam aspek permodalan, produksi dan operasi, pengelolaan keuangan, jaringan pemasaran, jejaring kemitraan dan sebagainya, sehingga seluruh industri rumahan di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur sepenuhnya siap dalam menghadapi MEA.

4.2. REKOMENDASI

1. Perlunya kebijakan khusus/spesifik terkait perlindungan dan pengembangan industri rumahan dalam bentuk PERDA baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur khususnya terkait cetak biru dan program kegiatan serta penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dalam menghadapi MEA.
2. Perlunya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku industri rumahan dari pemerintah daerah terkait dengan diversifikasi produk industri rumahan yang dihasilkan.



- Banyaknya sumberdaya dan potensi produk industri rumahan di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Jawa Timur apabila ditopang dengan beragamnya produk yang dihasilkan akan sangat menguntungkan bagi pengembangan usaha.
3. Perlunya pendampingan dan fasilitasi kemudahan dalam mengupayakan legalitas usaha industri rumahan, baik bentuk usaha maupun legalitas produk. Sehingga industri rumahan dapat memenuhi persyaratan di bidang permodalan (bankable) serta mampu memenuhi standar kualitas serta tata administrasi dalam menghadapi pasar baik local maupun internasional.
 4. Perlunya pengoptimalan dan kesinambungan dalam pendampingan industri rumahan khususnya industri rumahan perempuan, mengingat industri rumahan perempuan sangat rentan terhadap kestabilan usaha yang dipengaruhi posisi perempuan terkait fungsinya dalam keluarga.
 5. Perlunya program pendampingan dalam pemasaran produk industri rumahan terutama pemasaran lingkup internasional (ekspor) mengingat industri rumahan banyak memiliki keterbatasan dalam tata administrasi ekspor serta kendala dalam bahasa internasional, dan saat ini masih mengandalkan jejaring usaha dan pemasaran produk di tingkat daerah maupun nasional.
 6. Perlunya sinkronisasi dan kerjasama serta koordinasi antar dinas/instansi khususnya dalam ketersediaan data dan informasi serta dalam kegiatan pendampingan industri rumahan dalam rangka peningkatan bantuan permodalan, peningkatan kuantitas serta kestabilan kualitas produk industri rumahan sehingga mampu bersaing dan dapat diterima di pasar internasional khususnya pasar ASEAN.
 7. Perlunya mendorong industri rumahan agar produk yang dihasilkan ber-SNI dan memiliki desain produk sesuai dengan standar pasar ASEAN. Pembinaan standardisasi dan desain produk industri pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI), diseminasi *Good Manufacturing Practice (GMP)*, diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, penerapan standar, peningkatan mutu produk, diseminasi Batik Mark, pelatihan desain produk, pelatihan manajemen, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk, bimbingan Gugus Kendali Mutu (GKM), serta bimbingan penerapan ISO pada industri rumahan.
 8. Perlunya kebijakan terkait pengakuan terhadap existensi industri rumahan dan keberpihakan untuk keberlangsungannya.
 9. Perlunya upaya peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan asosiasi.



DAFTAR PUSTAKA

- APEC. (2006a). *A Research on the Innovation Promoting Policy for SMEs in APEC” Survey and Case Studies*. APEC SME Innovation Center, Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs, Seoul.
- Avillia, Uceu Pipip. 2006. *Analisis Gender Terhadap Koperasi Bina Usaha Wanita (KB UW) Di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi*. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Revisi KBLI 2007*. Jakarta : BPS
- [Bappeda] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Kendal. 2014. *Masterplan Percepatan Pengembangan Industri Rumah Tangga 2015-2030*. Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
- Boserup, Ester. 1984. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Grinjs, Mies, Ines Smyth, Anita van Velzen. 1994. “Introduction”. Di dalam Grinjs, Mies, Ines Smyth, Anita van Velzen, Sugiah Machfud, dan Pudjiwati Sayogyo, editor. *Different Women Different Work : Gender and Industrialisation in Indonesia*. Hans and Vermont : Avebury. Hlm : 1 – 8.
- Hanifah, Laily. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan jender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI
- Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Indraswari. 2004. *Perempuan dan Kerja*. Harian Umum Kompas, edisi Senin, 24 Mei 2004.
- Machfud, Sugiah, Anita van Velzen, Ines Smyth. 1994. “Women as entrepreneurs”. Di dalam Grinjs, Mies, Ines Smyth, Anita van Velzen, Sugiah Machfud, dan Pudjiwati Sayogyo, editor. *Different Women Different Work : Gender and Industrialisation in Indonesia*. Hans and Vermont : Avebury. Hlm : 123 – 146.
- Momsen, Janet Henshall. 2007. *Gender and Development*. London and New York : Routledge
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan* terjemahan dari *Half The World Half The Chance* penerjemah Hartian Silawati. Yogyakarta : Rifka Anisa.
- Mulyanto, Dede. 2008. ”Perempuan dan Keragaman Penghidupan di Pedesaan Jawa” dalam *Jurnal Analisis Sosial AKATIGA Volume 13 No.1 Juni 2008*.
- Ollenburger, Jane C dan Helen A Moore. 2002. *Sosiologi Wanita* terjemahan dari *A Sociology of Women* penerjemah Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sayogyo, Pudjiwati dan Ekawati Sri Wahyuni. 1994. “An introduction to the economy and people of West Java”. Di dalam Grinjs, Mies, Ines Smyth, Anita van Velzen, Sugiah Machfud, dan Pudjiwati Sayogyo, editor. *Different Women Different Work : Gender and Industrialisation in Indonesia*. Hans and Vermont : Avebury. Hlm : 29 – 46.
- Siahaan. 1996. *Pola Pengembangan Industri*. Jakarta [ID]: Departemen Perindustrian.



- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soeprapto, Riyadi. Tanpa tahun. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Diakses dari <http://publik.brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal>
- Tambunan T. 2001. Analisis Terhadap Peranan Industri Kecil/Rumah Tangga di dalam Perekonomian Regional: Suatu studi Perbandingan antar Kabupaten di Propinsi Jawa Barat,<http://psi.ut.ac.id/jurnal/4tulus/htm>.
- Tim Rifka Annisa. 2003. *Ketidakadilan Jender, Kesetaraan Jender, dan Pengarusutamaan Jender*. Harian Umum Kompas, edisi Senin, 10 Februari 2003.
- Wahyuni, Ekawati Sri dan Titik Sumarti. 2007. *Perspektif Gender dalam Pengembangan Masyarakat*. Tajuk Modul KPM-53G. Bogor : Sekolah Pascasarjana IPB



Lampiran 1.
PANDUAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
”Telaahan Kesiapan Provinsi Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur”

No	Topik	Peserta Diskusi	Waktu
A	Pembukaan oleh Tim		
	a) Moderator memperkenalkan diri, dan juga memperkenalkan peserta FGD b) Moderator menjelaskan tujuan dilakukannya FGD, dan manfaat yang diharapkan dilakukannya FGD	One-way	15 Menit
B	Topik 1- EXISTING CONDITION (IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN KESIAPAN UMKM DALAM DALAM PELAKSANAAN MEA 2015)		
	Apakah yang menjadi permasalahan bagi UMKM maupun Pemerintah Daerah dalam memasuki pasar MEA 2015 ? Apa sajakah potensi yang dimiliki UMKM maupun Pemerintah Daerah dalam memasuki pasar MEA 2015 ? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?	stakeholders terkait (PEMDA dan UMKM)	30 Menit
C	Topik 2- MEKANISME JEJARING DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI RUMAHAN		
	Apa sajakah yang telah dilakukan baik UMKM maupun PEMDA dalam mempersiapkan mekanisme jejaring dan pendampingan dalam dalam Pelaksanaan MEA 2015 ? Bagaimanakan peran anak dan perempuan dalam mempersiapkan dan menyongsong MEA 2015 ? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut?	stakeholders terkait (PEMDA dan UMKM)	30 Menit
D	Topik 3- USULAN REKOMENDASI		
	Rekomendasi apa saja yang perlu disampaikan dalam rangka mempersiapkan mekanisme jejaring dan pendampingan dalam dalam Pelaksanaan MEA 2015 (baik UMKM dan PEMDA) maupun peran anak dan wanita dalam dalam Pelaksanaan MEA 2015 ?	stakeholders terkait (PEMDA dan UMKM)	30 Menit
F	PENUTUPAN		
	Moderator menjelaskan resume dan kesimpulan serta hasil dari FGD	Moderator	15. menit



Lampiran 2.

ANGKET BAGI SKPD (INSTANSI PEMERINTAH DAERAH)

”Telaahan Kesiapan Provinsi Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur”

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Tidak	Ya	
A. Dukungan Kebijakan/Komitmen				
1	Apakah persiapan menyongsong MEA di daerah saudara mempunyai dukungan dalam bentuk kebijakan/komitmen dari pimpinan tertinggi dalam bentuk Perda/Surat Keputusan/Pedoman/Edaran? Jika Ya, Sebutkan nomor dan isinya Jika Tidak, tuliskan alasannya			Perda SK SE Kadis
2	Selain dalam bentuk tertulis, apakah pimpinan saudara pernah menyinggung masalah MEA pada pertemuan yang bukan secara khusus membahas tentang MEA? Jika Ya, sebutkan (kapan) Jika Tidak, jelaskan mengapa			Ya, dalam situasi apa? Rapat Upacara bendera Acara SKJ, lainnya
3	Apakah Saudara melakukan usaha-usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan persiapan MEA pada instansi Saudara? Jika Ya, sebutkan Jika Tidak, Mengapa			Ya: Mengupayakan dana APBD Advokasi DPRD/ Toga/ Toma/ Toda Membuat jejaring dg LSM/PT
4.	Adakah cetak biru untuk persiapan MEA			PERDA, Panduan
5.	Adakah prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah (program/kegiatan, pendampingan terhadap kegiatan UMKM dan sektor perekonomian secara umum)?			
6.	Adakah dukungan pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan terhadap persiapan MEA? (pendampingan, kelompok kerja, KIE, media komunikasi)			
B. Program/Kegiatan Dalam Pelaksanaan MEA dan Mekanisme Jejaring				
1	Adakah program/kegiatan yang secara jelas mensosialisasikan persiapan MEA? Jika Ya, sebutkan Jika Tidak, jelaskan mengapa			
2	Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan persiapan MEA khususnya lingkup UMKM di lembaga saudara? Jika Ya, bagaimana mensosialisasikannya? Jika Tidak, mengapa?			



No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Tidak	Ya	
3	Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan persiapan MEA khususnya lingkup UMKM di lembaga saudara? Jika Ya, bagaimana mensosialisasikannya? Jika Tidak, mengapa?			
4	Apakah lembaga saudara sudah membuat mekanisme jejaring untuk: Jejaring di Internal, sebutkan			
	Jejaring di Eksternal, sebutkan			
	Jejaring Regional Kabupaten/kota, sebutkan			
C. Dukungan SDM untuk Persiapan MEA				
1	Apakah pimpinan eselon 3 yang ada di lembaga Saudara sudah memahami MEA? Jika Ya, atau Tidak, tolong jelaskan alasannya.			
2	Apakah ada bidang/bagian pada unit kerja saudara yang personilnya memahami MEA dengan baik? Jika Ya, sebutkan nama bidang/ bagiannya Jika Tidak, jelaskan			
3	Apakah sebagian besar pegawai yang ada di lembaga Saudara memahami MEA? Jika Ya, atau Tidak, tolong jelaskan alasannya.			
4	Apakah ada bidang/bagian pada unit kerja saudara yang mensosialisasikan MEA pada UMKM? Jika Ya, sebutkan nama bidang/ bagiannya Jika Tidak, jelaskan			
5	Apakah ada bidang/bagian pada unit kerja saudara yang memberikan pelayanan konsultasi/pendampingan tentang persiapan MEA pada UMKM? Jika Ya, sebutkan nama bidang/ bagiannya Jika Tidak, jelaskan			
6	Apakah ada bidang/bagian pada unit kerja saudara yang memberikan pelayanan konsultasi/pendampingan tentang persiapan MEA pada UMKM khusus untuk perempuan? Jika Ya, sebutkan nama bidang/ bagiannya Jika Tidak, jelaskan			
D. Dukungan Anggaran untuk Dalam Pelaksanaan MEA				
1	Apakah lembaga Saudara sudah mengalokasikan khusus untuk program persiapan MEA? Jelaskan			
2	Jika Jawaban pada nomor D.1 Ya, sebutkan jumlah anggarannya untuk: Tahun 2014			
	Tahun 2015			
3	Apakah lembaga Saudara sudah mengalokasikan khusus untuk program persiapan MEA untuk UMKM? Jelaskan			
4	Jika Jawaban pada nomor D.3 Ya, sebutkan jumlah anggarannya untuk: Tahun 2014			
	Tahun 2015			
5	Apasajakah yang Saudara lakukan untuk mendorong adanya dukungan anggaran untuk persiapan MEA? Sebutkan			
E. Ketersediaan Data UMKM				
1	Apakah instansi Bapak/Ibu mempunyai data UMKM? Jelaskan, mohon foto copinya			
2	Jika Ya, pada nomor F.1. Apakah data tersebut disebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk profil, buku, atau di Website lembaga Saudara? Jelaskan			
3	Jika Sudah mempunyai data UMKM, apakah data tersebut digunakan dalam penyusunan perencanaan persiapan MEA?			



No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Tidak	Ya	
	Jika Ya, pada program/kegiatan apa? Jika Tidak, mengapa			
F	Ketersediaan KIE			
1	Adakah KIE? Apa saja sebutkan			
2	Adakah Media Komunikasi? Apa saja sebutkan			
G	Khusus Pendampingan UMKM Perempuan			
1	Adakah pendampingan Pemda untuk UMKM khusus Perempuan? Jelaskan			
2	Apakah ada data terpilah berdasarkan pemilik UMKM apakah laki-laki atau perempuan?			
3	Apa tantangan UMKM Perempuan menurut Saudara?			

Keterangan: MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- Berdasarkan identifikasi kondisi yang ada, pemerintah Kabupaten/Kota.....
(SIAP/BELUM SIAP)* dalam Pelaksanaan MEA 2015, alasan :
.....
.....
.....
- Berdasarkan identifikasi kondisi yang ada, UMKM Kabupaten/Kota.....
(SIAP / BELUM SIAP)* dalam Pelaksanaan MEA 2015, alasan :
.....
.....
.....
- Berdasarkan data yang saudara miliki, isu UMKM apa saja yang terjadi di
lembaga/daerah Saudara ?
.....
.....
.....
- Sebutkan hal-hal penting yang dibutuhkan dalam mewujudkan perencanaan dan persiapan
MEA 2015 di lembaga Saudara ?
.....
.....



.....
.....

RENCANA PERSIAPAN MEA

Tuliskan rencana untuk persiapan MEA 2015 di instansi saudara

NO.	ASPEK	RENCANA PERSIAPAN
1.	Mekanisme Jejaring Industri Rumahan	
2	Pendampingan Industri Rumahan	
3		
4		
5		



Lampiran 3. ANGKET BAGI UMKM

”Telaahan Kesiapan Provinsi Dalam Pelaksanaan MEA-Utamanya Mekanisme Jejaring dan Pendampingan Industri Rumahan – Study Kasus Di Propinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur”

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Tidak	Ya	
A. Dukungan Kebijakan/Komitmen Pemda				
1	Apakah persiapan menyongsong MEA di daerah saudara mempunyai dukungan dalam bentuk kebijakan/komitment dari Pemda dalam bentuk Perda/Surat Keputusan/Pedoman/Edaran? Jika Ya, Sebutkan nomor dan isinya Jika Tidak, tuliskan alasannya			Perda SK SE Kadis
2	Apakah Saudara melakukan usaha-usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan persiapan MEA pada UMKM Saudara? Jika Ya, sebutkan Jika Tidak, Mengapa			Ya: Mengupayakan dana APBD Advokasi DPRD/ Toga/ Toma/ Toda Membuat jejaring dg LSM/PT
B. Program/Kegiatan Persiapan MEA dari Pemda				
1	Adakah program/kegiatan dari Pemda yang secara jelas mensosialisasikan persiapan MEA? Jika Ya, sebutkan Jika Tidak, jelaskan mengapa			
2	Apakah UMKM Saudara mengalami kesulitan dalam mencari informasi dalam mempersiapkan MEA? Jika Ya, bagaimana mensosialisasikannya? Jika Tidak, mengapa?			
3	Apakah UMKM saudara sudah membuat jejaring (PUG) Sebutkan			
C. Dukungan SDM untuk Dalam Pelaksanaan MEA dari Pemda				
1	Apakah pimpinan UMKM di tempat Saudara sudah memahami MEA? Jika Ya, atau Tidak, tolong jelaskan alasannya.			
2	Apakah sebagian besar pegawai yang ada di UMKM Saudara memahami MEA? Jika Ya, atau Tidak, tolong jelaskan alasannya.			
D. Ketersediaan KIE				
1	Adakah KIE dari Pemda? Apa saja sebutkan			
2	Adakah Media Komunikasi dengan Pemda? Apa saja sebutkan			
E. Kualitas Produk dan Keterjangkauan Harga				
1	Apakah kualitas produk UMKM sudah baik ?			
2	Apakah harga sudah dapat dijangkau ?			
F. Jejaring dalam Pemasaran: Jaringan Pemasaran				
1	Dalam Negeri			
2	Luar Negeri			



No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Tidak	Ya	
G	Jejaring Kemitraan: Kemitraan Usaha			
1	Dalam Negeri			
2	Luar Negeri			
H	Hubungan dengan Instansi Pemerintah			
1	Adakah?			
2	Jelaskan dalam hal apa?			
3	Seberapa sering?			
I	Kesiapan mental untuk berkompetisi global			
1	Merasa takut?			
2	Merasa tertantang?			
3	Merasa senang?			
4	Merasa siap segalanya?			
J	Khusus UMKM Perempuan			
1	Adakah pendampingan Pemda untuk UMKM khusus Perempuan?			
	Jelaskan			
2	Apa tantangan UMKM Perempuan menurut Saudara?			
3	Apakah UMKM Perempuan merasa terpinggirkan dan dianaktirikan dibandingkan dengan UMKM laki-laki? Jelaskan			

Keterangan: MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)